



Edisi II, Juni 2025, Vol XXI

ISSN 2987-7873

INFOGATRIK

BULETIN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Rupitl

TAJUK UTAMA :

MENTERI ESDM UMUMKAN RUPTL PLN 2025-2034

Serap Lebih dari 1,7 Juta Tenaga Kerja Baru

TAJUK UTAMA :

8

Dari Lampu Pelita ke
Terang Nusantara:
Tekad Menteri Bahliil
Terangi Desa Melalui Lisdes

9

Umumkan
RUPTL PLN 2025-2034,
Menteri Bahliil Ungkap
Peluang Investasi 2.967,4 T

10

Umumkan RUPTL
PLN 2025-2034,
Menteri ESDM Targetkan
Tambahan Kapasitas
Pembangkit Listrik 69,5 GW



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



RUPTL PLN 2025-2034

PEMERINTAH TARGETKAN 780 RIBU RUMAH TANGGA TERANG MELALUI LISTRIK PERDESAAN



PENAMBAHAN KAPASITAS
PEMBANGKIT LISTRIK
SEBESAR
394 MW.

**"Alhamdulillah saya bisa
aktivitas dengan nyaman setelah
sebelumnya listrik di desa hanya
menyala 14 jam setiap hari."**

Suprihatin (63), Petani

warga Desa Parit, Kecamatan Selat Gelam,
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
Penerima program listrik desa dengan Jam
Nyala 24 Jam per Hari





INFOGATRIK

BULETIN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Edisi II, Juni 2025, Vol XXI

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Pimpinan Redaksi

Pandu Satria Jati Bonifasius

Redaktur

Agnes Tania
Anggita Miftah Hairani
Utami Hikmaasih
Ronggo Anugerah
Dina Andriani
Ernawaty
Reskianto Windharto
David Firnando Silalahi
Khairiah Dewi
Alfina Zussidas
Lucius Patria Giri Dwi Astanto
Arnaldo Simarmata
Sankara Cinthadiliaga
Elif Doka Marliska

Penyunting/Editor

Agus Surahman
Additya Fitroh Firmansyah
Virbyansyah Achamdan Nurrohman
Fahreza Khairullah

Desain Grafis

Jeha Gumelar
Fiantina Mayasari
Muhammad Nur
Nur Mazidah

Fotografer

Agah Muhammad Abduh
Ajat Munajat
Arujin

Sekretariat

Herlita
Iswy Marwanti

Alamat Redaksi

Redaksi INFOGATRIK
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav 7-8
Kuningan, Jakarta Selatan
12950

gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034 pada tanggal 26 Mei 2025. Saat ini, perencanaan energi dan ketenagalistrikan antara Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan RUPTL telah sejalan, saling melengkapi dan memperkuat.

RUPTL PLN 2025-2034 menargetkan kapasitas pembangkit nasional sebesar 443 GW pada tahun 2060. Dokumen ini merupakan komitmen konkret pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih. Implementasi rencana ini juga diharapkan membawa dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.

Pengumuman RUPTL PLN terbaru menjadi Tajuk Utama dalam Buletin Infogatrik kali ini. Pada rubrik Liputan Khusus, kami hadirkan laporan mengenai Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN 2025-2034. Dalam sosialisasi tersebut, PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan RUPTL yang sudah diumumkan oleh Pemerintah. Kementerian ESDM juga mengenalkan untuk mengakselerasi investasi ketenagalistrikan melalui "CONNECTIVITY".

Melalui berbagai informasi yang kami sajikan, kami berharap edisi kali ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam menyediakan energi yang andal, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Selamat membaca!

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran Font yang digunakan 12 pt
3. Jarak spasi penulisan 1,5 pt
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600 - 1000 kata

Syarat Umum :

1. Judul Naskah menggunakan kalimat menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum, misalnya : tentang manajemen, pengembangan diri, dll
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA



6

Menteri ESDM Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Serap Lebih dari 1,7 Juta Tenaga Kerja Baru

TAJUK UTAMA



8

Dari Lampu Pelita ke Terang Nusantara: Tekad Menteri Bahlil Terangi Desa Melalui Lisdes

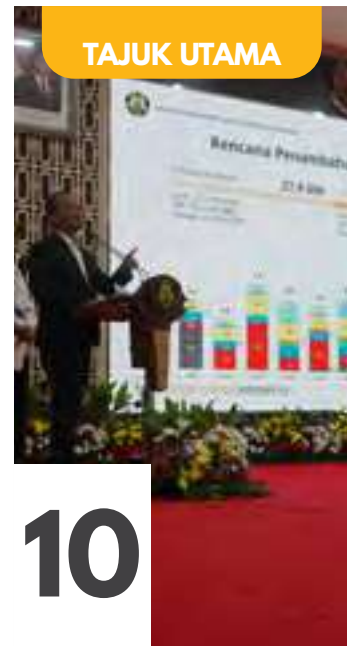
TAJUK UTAMA



9

Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Menteri Bahlil Ungkap Peluang Investasi 2.967,4 T

TAJUK UTAMA



10

Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Menteri ESDM Targetkan Tambahan Kapasitas Pembangkit Listrik 69,5 GW

KABAR

- | | | |
|---|---|---|
| 16 Buka HCS 2025, Menteri ESDM Sampaikan 6,2 Juta Lapangan Kerja Terbuka dari Sektor ESDM | 23 Komitmen ASEAN Mengembangkan Energi Rendah Emisi Melalui Teknologi Bersih | 31 Indonesia Tegaskan Komitmen Pemanfaatan Green Hydrogen sebagai Pilar Transisi Energi Masa Depan |
| 17 Patriot Energi, Penggerak Pemerataan Akses Listrik EBT | 24 Dorong Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan, Dirjen Gatrik Tinjau Kesiapan Industri GPAS | 32 Buka Global Hydrogen Summit 2025, Menteri ESDM Tegaskan Pemanfaatan Hidrogen sebagai Upaya Kedaulatan dan Swasembada Energi |
| 18 Kementerian ESDM Tegaskan Komitmen Alirkan Listrik Ke Kawasan-Kawasan Khusus | 25 Tingkatkan Budaya Literasi, Ditjen Ketenagalistrikan Kini Punya Komunitas Belajar | 34 Kementerian ESDM dan DPR Dorong Penerapan Teknologi Bersih di PLTU Paiton |
| 19 Tumbuhkan Minat Baca, Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Kompetisi Bedah Buku Battle Series | 26 DPR RI dan KESDM Tinjau Kontribusi PLTU Batang dalam Ketahanan Energi Nasional | 35 Posko Nasional RAFI Sektor ESDM Ditutup, Pasokan Listrik Dilaporkan Aman |
| 20 Pemerintah Siapkan Regulasi dan Gencarkan Sosialisasi GPAS untuk Tingkatkan Keselamatan Listrik | 27 Tinjau Labuan Bajo, Komisi XII DPR RI dan ESDM Dorong Pemanfaatan Energi Bersih | 36 Halal Bihalal Sektor ESDM, Menteri Bahlil Dorong Percepatan Perizinan |
| 21 Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangan PLTN di Indonesia | 28 Habis Gelap Terbitlah Terang, Kiprah Kartini Masa Kini dalam Energi Bersih | 37 Halal Bihalal, Momentum Penyemangat Peningkatan Kinerja |
| 22 Ditjen Ketenagalistrikan dan JICA Gelar <i>Technical Workshop for Energy Transition</i> | 30 Kolaborasi Indonesia dan Finlandia Dorong Pemanfaatan Energi Bersih | |

INFOGATRIK

BULETIN DITJEN KETENAGALISTRIKAN



LIPUTAN KHUSUS

11

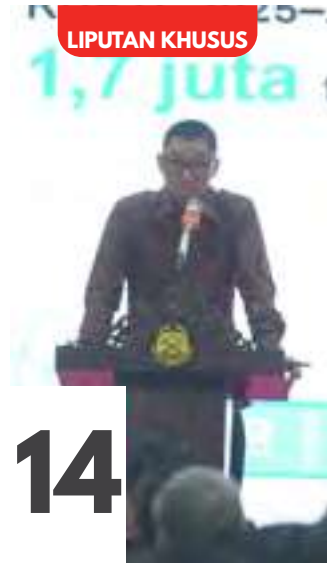
Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN: 780 Ribu Rumah Tangga Akan Berlistrik Melalui Program Lisdes



LIPUTAN KHUSUS

12

Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN 2025-2034, Kementerian ESDM Tegaskan Komitmen Menuju Swasembada Energi



LIPUTAN KHUSUS

14

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, PLN Siap Jalankan RUPTL 2025-2034



LIPUTAN KHUSUS

15

Akselerasi Investasi Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Kenalkan "CONNECTIVITY"

KABAR

38 Menteri ESDM Dorong PLN Bangun PLTP 40 MW di Maluku

39 Jelang Hari Raya Idulfitri, Ditjen Gatrik Gelar Sharing Session Pengendalian Gratifikasi

WAWASAN

40 Ketahanan Energi Nasional: Menyusun Ulang Strategi di Tengah Ketidakpastian Global

FOTO BERCERITA

43 Liga Futsal Gatrik : Tingkatkan Produktifitas melalui olah raga

PROFILE PEGAWAI

44 Ngobrolin Dunia ASN Bareng Ahli SDM Gatrik

Rahayu Kurniasari

POJOK LITERASI

46 Pojok Literasi

POJOK GATRIK

49 SPKLU di Kantor Ditjen Gatrik

TANYA JAWAB

50 TANYA JAWAB : Terkait RUPTL

FUN FACT

52 Yuk Kita Kenalan dengan PLTP Ijen di Jawa Timur

QUIZ CORNER

53 QUIZ CARI 5 PERBEDAAN

MENTERI ESDM UMUMKAN RUPTL PLN 2025-2034, SERAP LEBIH DARI 1,7 JUTA TENAGA KERJA BARU

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034 pada tanggal 26 Mei 2025. Penyusunan dokumen RUPTL PLN 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target *Net Zero Emission (NZE)* pada 2060.

"Komitmen Paris Agreement terkait transisi energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa negara keluar dari komitmen awal, namun kita harus konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5).

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76 persen kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan *pumped storage*. Pada lima tahun pertama, akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW--yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi.

Memasuki lima tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi sebesar 37,7 GW atau 90 persen dari total kapasitas yang direncanakan.

Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batubara dan gas.

Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW.

Untuk mendukung distribusi dan keandalan sistem, pembangunan infrastruktur kelistrikan juga diperkuat. Pemerintah menargetkan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA, yang akan tersebar di seluruh Indonesia--dari Sumatera hingga Papua.

"Semua desain ini, kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu.



Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengumumkan RUPTL PLN 2025 - 2034 dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/05/25)

Karena selama ini kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN bayar *take or pay*-nya 80% itu. Kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan,” jelas Bahlil.

Dari sisi investasi, RUPTL PLN ini membuka peluang senilai Rp2.967,4 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Menariknya, sekitar 73 persen dari total kapasitas pembangkit direncanakan berasal dari skema kemitraan dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya akan dikelola oleh Grup PT PLN.

Implementasi dari rencana penyediaan usaha tenaga listrik ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, salah satunya dengan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Peluang ini tersebar di berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk sektor manufaktur pendukung. EBT menjadi kontributor utama serapan tenaga kerja, sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan.

Dokumen RUPTL PLN 2025-2034 merupakan komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih.

Dokumen ini diharapkan menghadirkan kepastian iklim investasi sekaligus menjadi penanda arah baru (*grand design*) pembangunan ketenagalistrikan nasional selama satu dekade mendatang. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

RUPTL PLN 2025-2034 juga memberi perhatian besar pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

“Bagi saya energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus kita lakukan dari Aceh sampai Papua. Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar di desa-desa yang belum ada listrik agar segera kita pasang. Jadi kita akan lakukan ini sampai 2029 selesai dan mulai dari sekarang bertahap kita lakukan,” pungkas Bahlil.



Dari Lampu Pelita ke Terang Nusantara: Tekad Menteri Bahlil Terangi Desa Melalui Lisdes

Suatu pagi di Maluku Tengah, puluhan tahun silam, seorang anak kecil terbangun dengan noda hitam di keningnya. Bukan karena bermain kotor-kotoran, melainkan karena asap lampu pelita yang menemani tidurnya semalaman.

Di kampung halamannya yang belum teraliri listrik, penerangan malam hanya berasal dari nyala temaram lampu minyak tanah. Namun anak itu tetap gigih berusaha memperbaiki nasib, hingga kini menjadi seorang Menteri.

Itulah sepenggal kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.



Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memberi sambutan dalam acara pengesahan RUPTL PT PLN tahun 2025-2034, Jakarta, Senin (26/05/25)

Kenangan masa lalu tanpa listrik tak lekang dalam ingatannya. Kini, sebagai pemegang amanah pemerataan energi nasional, Bahlil memimpin langsung Program Listrik Desa (Lisdes) yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2039. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen mengaliri listrik ke 5.758 desa yang hingga kini masih hidup dalam gelap.

“Saya tidak ingin ada lagi anak-anak Indonesia yang tumbuh tanpa listrik seperti saya dulu. Ini bukan hanya soal energi, ini tentang keadilan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Melalui Program Lisdes, pemerintah tidak hanya bertekad membangun pembangkit listrik dengan kapasitas total 394 megawatt, tetapi juga menyambungkan aliran listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Proyek ini membutuhkan investasi sekitar Rp50 triliun dan membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta.

“Program ini bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun harapan. Listrik adalah pintu menuju pendidikan yang layak, akses informasi, dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Bahlil.

Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah berhasil dilistriki. Namun pekerjaan belum usai. Masih ada jutaan warga yang belum menikmati nyala lampu saat malam tiba, yang harus bergantung pada lilin atau lampu pelita seperti masa kecil Menteri Bahlil.

Program Lisdes nyata dirasakan oleh Kasius,

Kepala Desa Sukabangun, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Senyumnya melebar saat menceritakan perubahan signifikan yang terjadi di desanya. Setelah bertahun-tahun tak menikmati nyala listrik, kini ia dan warga lain akhirnya bisa merasakan kehadiran listrik tak hanya di malam hari tapi 24 jam non-stop.

“Saya sangat gembira dan bersyukur listrik sudah masuk di desa kami. Semoga dengan adanya listrik ini desa kami menjadi maju dan ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat lagi,” ungkapnya.

Salah satu bagian dari Program Lisdes adalah kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat tidak mampu.

Sampai akhir tahun 2024, sebanyak 367.212 rumah tangga di seluruh Indonesia sudah menikmati akses listrik yang mandiri melalui BPBL. Program ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memastikan aspek keselamatan kelistrikan di lingkungan rumah tangga terpenuhi.

Sebagai penerima BPBL, ucapan syukur tidak pernah lepas dari cerita ibu Satiyem (90), seorang lansia yang hidup sendiri di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

“Alhamdulillah, makasih sekarang rumah saya sudah terang,” ungkapnya.

Program BPBL menjadi pelengkap dari skema Lisdes dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam penyediaan listrik masyarakat. Melalui Lisdes dan program-program pendukung seperti BPBL, pemerintah ingin menjadikan nyala itu sebagai keniscayaan.

Bagi Bahlil Lahadalia, program Lisdes bukan sekadar angka, target, atau proyek. Ini adalah kisah pribadinya yang kini ingin ia ubah menjadi cerita kolektif bangsa: dari kegelapan menuju terang, dari keteringgalan menuju pemerataan. Karena setiap anak Indonesia berhak belajar di bawah cahaya lampu, bukan redup api pelita. (JG)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Dirjen Ketenagalistrikan (kiri) dan Dirjen EBTKE (kanan) saat memberi sambutan dalam acara pengesahan RUPTL PT PLN tahun 2025 - 2034, Jakarta, Senin (26/05/25)

Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Menteri Bahlil Ungkap Peluang Investasi 2.967,4 T

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025). RUPTL ini membuka peluang investasi sebesar Rp2.967,4 Triliun yang akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi dan program listrik desa.

"Nah peluang investasi 2025-2034 sebesar 2.967,4 triliun rupiah, terdiri dari pembangkit 2.133,7 T, penyaluran ini 565,3 T, dan lain-lain 268,4 T untuk pemeliharaan, smart grid," ujar Bahlil.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa rencana investasi ini terbagi dalam dua tahap, untuk lima tahun pertama, peluang investasinya sebesar Rp1.173,9T dan untuk tahap kedua sebesar Rp1.793,48T.

"Tahun kedua ini banyak 1.793,48 T. Kalau yang pertama 1.173 T dan ini harus dua kali (lipat-red) supaya ada kesinambungan. Jadi tidak boleh kita rubah, apa sudah ada, kita lanjutkan," jelas Bahlil.

Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa sekitar 73% dari total investasi pembangkit atau sebesar Rp2.133,7T direncanakan melalui skema kemitraan dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP). Sementara sisanya dikelola oleh grup PT PLN (Persero).

Dari peluang investasi pembangkit untuk swasta/IPP sebesar Rp1.566,1 T, rinciannya adalah sebesar Rp1.341,8T untuk energi baru terbarukan (EBT) dan Rp224,3T untuk non EBT. Sementara itu, peluang investasi bagi PT PLN (Persero) yang mencapai Rp567,6T, terdiri dari Rp340,6T untuk pembangkit EBT dan Rp227,0T untuk non EBT.

"Khusus untuk pembangkit, IPP nya sebesar 1.566,1 T, ini artinya investasi swasta. Sedangkan untuk investasi PLN dari 2.000 T lebih, khusus untuk pembangkit sebesar 567,6 T rupiah," pungkas Bahlil. (U)



Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Menteri ESDM Targetkan Tambahan Kapasitas Pembangkit Listrik 69,5 GW

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt (GW) selama sepuluh tahun ke depan.

76 persen penambahan kapasitas pembangkit listrik tersebut akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) serta sistem penyimpanan energi seperti baterai dan *pumped storage*. Target ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2025-2034 yang diumumkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (26/5/2025) di Jakarta.

"Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2034, ini *opportunity* yang sangat bagus sekali," ujar Bahlil.

Dalam dokumen RUPTL tersebut, rencana pembangunan pembangkit listrik lima tahun pertama mencakup kapasitas 27,9 GW, dengan rincian 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan energi, serta 3,5 GW dari pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi. Selanjutnya,

pada lima tahun kedua, fokus utama bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi dengan total kapasitas 37,7 GW atau 90 persen dari keseluruhan rencana.

Bahlil memaparkan juga pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan dalam RUPTL ini meliputi tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, pemerintah mulai memperkenalkan energi baru seperti nuklir dengan rencana pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW.

Bahlil menegaskan bahwa proyeksi pembangunan pembangkit listrik yang tertuang dalam RUPTL telah disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen.

"Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama," ungkap Bahlil.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mendorong transisi energi serta meningkatkan ketahanan listrik nasional dalam satu dekade mendatang. (AT)



Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Dirjen Ketenagalistrikan (kiri) dan Dirjen EBTKE (kanan) saat memberi paparan dalam acara Pengesahan RUPTL PT. PLN tahun 2025 - 2034, Jakarta, Senin (26/05/25)

Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN: 780 Ribu Rumah Tangga Akan Berlistrik Melalui Program Lisdes

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menyediakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 yang ditargetkan melistriki 780 ribu rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik. Hal itu ia sampaikan dalam acara Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, di Jakarta, Senin (2/06/2025).

“Ada sekitar 780 ribu saudara kita rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik, ini sangat penting ya, karena sampai sekarang kita hampir 80 tahun merdeka masih ada saudara kita belum menikmati listrik,” ujar Jisman.

Ia menjelaskan bahwa untuk melistriki 780 ribu rumah tangga di 5.758 desa, membutuhkan sebesar Rp50,01 triliun dalam pelaksanaan 5 tahun kedepan.

“Memang anggarannya cukup besar, kita sudah siapkan roadmap-nya sekitar 50 triliun dan ada 5.700 desa yang belum dilayani oleh PLN,” jelas Jisman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, pihaknya tengah memetakan cluster-cluster penduduk yang belum berlistrik untuk dialiri listriknya.

“Dipetakan pertama adalah infrastruktur kelistrikan kita yang terdekat ada dimana, baik itu gardu induk, maupun transmisi, maupun distribusi yang 20 kV. Kemudian bagaimana cara nyambungannya itu, maka kalau belum ada itu sambungannya yang paling dekat, bagaimana menggunakan

PLTS dengan *Battery Energy Storage System* maupun PLTS dengan hidrogen,” kata Darmawan.

Dalam upaya melistriki masyarakat tersebut, pemerintah mendorong agar sambungan listrik berasal dari PT PLN (Persero) agar lebih sustain dan dapat memperoleh subsidi listrik bagi yang berhak.

“Jadi kita mendorong desa tersebut dilayani (listriknya-red) oleh PLN supaya lebih sustain. Dan ada hal lagi yang menguntungkan, dengan dilayani PLN, masyarakat 3T yang belum mendapatkan listrik dan berhak atas subsidi bisa mendapatkan subsidi,” ungkap Jisman.

Lisdes merupakan program pemerintah melalui penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melistriki seluruh pelosok desa dengan membangun jaringan distribusi. Program ini merupakan program rutin, dimana hingga akhir tahun 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah menikmati listrik. Tak hanya Lisdes, sejak tahun 2022 hingga 2024 Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu sebagai komitmen pemerintah mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik. (U)



Dirjen Ketenagalistrikan memberikan sambutan pembukaan dalam acara Coffee Morning Diseminasi RUKN dan RUPTL PT. PLN (Persero) di Jakarta, Senin (02/06/25)



DISEMINASI

RUKN DAN RUPTL PLN TAHUN 2025-2034

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan KESDM, Jisman P Hutajulu memberikan sambutan pembukaan Diseminasi RUPTL PT PLN 2025 - 20234, Jakarta, Senin (02/06/25)



Diseminasikan RUKN dan RUPTL PLN 2025-2034, Kementerian ESDM Tegaskan Komitmen Menuju Swasembada Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendiseminasikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, Senin (2/06/2025) di Jakarta. Dokumen RUKN dan RUPTL ini menegaskan komitmen untuk menuju swasembada energi melalui penguatan perencanaan ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perencanaan energi dan ketenagalistrikan antara Kebijakan Energi Nasional (KEN), RUKN dan RUPTL saat ini sudah sejalan, saling melengkapi dan memperkuat. RUKN yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM menurut Jisman akan diisi oleh pemegang wilayah usaha tenaga listrik, di mana pemegang wilayah usaha terbesar adalah PLN yang menyediakan 80% tenaga listrik di Indonesia. Ia berharap PLN dapat menjalankan RUPTL yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Lebih lanjut Jisman menyampaikan target kapasitas pembangkit nasional pada tahun 2060 sebesar 443 GW yang dirancang untuk mencapai *Net Zero Emissions (NZE)*. Dokumen RUPTL PLN disebut Jisman telah memenuhi, bahkan melampaui proyeksi bauran EBT tahunan dalam RUKN. Dari total tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, kontribusi pembangkit EBT mencapai 42,6 GW (61%), *energy storage* sebesar 10,3 GW (15%), dan pembangkit berbasis energi fosil sebesar 16,6 GW (24%).

"Karena kita punya potensi besar untuk surya kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita sehingga kita mendorong PLTS 17,1 GW, yang kita akan dorong nanti adalah PLTS terapung sebagaimana halnya contoh dari PLTS yang ada di Cirata," tegas Jisman.

Salah satu aspek krusial dalam penyediaan tenaga listrik adalah pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi secara nasional, atau dikenal sebagai *Supergrid*. Melalui supergrid pemerintah merencanakan solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian antara



lokasi potensi EBT dengan pusat beban (*demand center*).

“Nantinya akan dibangun transmisi supergrid yang menghubungkan antar pulau juga di dalam pulau yang akan mengangkut EBT dari sumbernya yang kita tahu jauh dari pusat bebannya,” tegas Jisman.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan keadilan energi, pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik pada tahun 2029 melalui Program Listrik Perdesaan (LISDES) 2025–2029. Program ini dirancang untuk menyediakan sambungan listrik bagi sedikitnya 780 ribu rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.

“Kami sudah menyiapkan roadmapnya sekitar 50 triliun dan ada 5.700 desa yang belum dilayani oleh PLN, jadi kita mendorong desa

tersebut dilayani oleh PLN supaya lebih sustain,” ujar Jisman.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan PLN dalam melaksanakan RUPTL 2025–2034. Komitmen tersebut ia sampaikan untuk mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sesuai target pemerintah. Ia juga menyampaikan PLN tidak

bisa sendiri dalam melaksanakan RUPTL dan membutuhkan dukungan pihak-pihak lain, terutama investasi dari swasta.

“Kami akan menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, untuk menarik lebih banyak investasi, untuk menghilangkan kelaparan, memberantas kemiskinan, dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat,” ungkap Darmawan. **(RO)**



merupakan *green jobs*.

RUPTL 2025–2034
1,7 juta te



PLN siap menjalankan arahan Pemerintah untuk bergotong royong mengeksekusi RUPTL 2025–2034 untuk mendukung tercapainya swasembada energi yang berkeadilan dan pertumbuhan ekonomi 8%.



Direktur Utama PT. PLN (persero) Dharmawan Prasodjo memberikan paparan dalam acara Diseminasi RUPTL di Jakarta. Senin (02/06/25)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, PLN Siap Jalankan RUPTL 2025-2034

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Senin (2/6/2025) di Jakarta. Dalam acara tersebut PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya melaksanakan RUPTL yang sudah diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan, guna mendukung swasembada energi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, PLN siap menjalankan keputusan pemerintah terkait RUPTL. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan *environmental sustainability*.

“Maka dalam hal ini kami penuh dengan kebanggaan, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk menjalankan RUPTL ini,” tegasnya.

Darmawan menjelaskan bahwa dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai sekitar Rp 22.000 triliun, eksekusi RUPTL 2025–2034 senilai Rp 3.000 triliun (Rp 300 triliun per tahun) diproyeksikan berkontribusi sekitar 1,4% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahunnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam merencanakan infrastruktur ketenagalistrikan pada RUPTL 2025–2034, PLN memperhatikan

secara komprehensif 5 elemen keberlanjutan, yaitu keamanan energi, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sistem kelistrikan, keberlanjutan keuangan perusahaan, dan keberlanjutan fiskal.

“Kita harus mempertimbangkan *environmental sustainability*, dimana kita harus juga mengurangi emisi gas rumah kaca,” terang Darmawan.

Menurut Darmawan, pelaksanaan RUPTL adalah tanggung jawab bersama, yang membutuhkan peran aktif dari BUMN, sektor keuangan, perbankan, dan badan usaha swasta, termasuk *Independent Power Producer* (IPP).

Dalam acara tersebut, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero), Evy Haryadi menjelaskan bahwa RUPTL 2025–2034 telah dirancang dengan *reserve margin* minimal 34% pada tahun 2034. Tujuannya adalah untuk memastikan kecukupan daya dan keandalan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Evy menyampaikan, dibutuhkan

keterlibatan peran serta swasta dalam rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik untuk pembangunan pembangkit dan transmisi, dimana 71% porsi pembangkit direncanakan akan dikembangkan oleh swasta.

“Kebutuhan pembiayaan ini cukup besar, yang tentunya ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ungkap Evy. (RO)



Executive Chairperson of Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office, Edo Mahendra memberikan paparan mengenai CONNECTIVITY di Jakarta. Senin (02/06/25)

Akselerasi Investasi Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Kenalkan “CONNECTIVITY”

Guna mendukung implementasi dan akselerasi investasi ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun sebuah platform digital bernama “Collaborative Network of New and Clean Technology Investment in Electricity” (CONNECTIVITY).

Platform ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemilik proyek, pengembang, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mempermudah akses informasi terhadap proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu pada Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, Senin (2/06/2025) di Jakarta.

“Informasi-informasi termasuk RUPTL ada di dalam CONNECTIVITY ini sehingga mudah masyarakat untuk mengetahui dan diarahkan untuk melaksanakan RUPTL ini,” jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu

Executive Chairperson of Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office, Edo Mahendra, menekankan bahwa CONNECTIVITY hadir untuk menciptakan enabling conditions (kondisi mendukung) yang memungkinkan percepatan proyek-proyek energi berjalan lebih efisien dan sistematis.

“Tugas utama kami adalah memastikan percepatan ini berlangsung dengan baik, dengan menyediakan platform yang mendukung perencanaan bisnis,” ujar Edo.

CONNECTIVITY menjadi pusat pertukaran informasi satu pintu, mencakup proyek-proyek yang terdapat dalam RUPTL maupun non-RUPTL. Platform ini juga dirancang untuk mengatasi tantangan seperti minimnya entry point yang jelas dan keterputusan data, yang sering menjadi hambatan bagi investor.

“Selama ini, biaya pencarian proyek atau mitra finansial cukup tinggi, menyebabkan transaksi yang mahal. CONNECTIVITY akan memangkas hambatan tersebut,” tambah Edo.

Platform ini telah melalui uji coba dan mendapatkan respons positif dari mitra

internasional, termasuk Jepang, saat pertama kali diperkenalkan dalam ajang Japan RE Invest Indonesia 2024. CONNECTIVITY dijadwalkan resmi diluncurkan pada Indonesia Electricity Investment Summit di bulan Agustus 2025, sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan investasi di sektor ketenagalistrikan.

“CONNECTIVITY bukan hanya sekadar platform digital milik BUMN, tetapi hasil kolaborasi lintas pemangku kepentingan dari regulator, PLN, hingga sektor swasta dan internasional. Kami ingin menjadikannya fondasi yang kuat agar strategi transisi energi nasional semakin dipercepat,” tutup Edo. (AT)



Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memberikan sambutan dalam pembukaan acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta. Selasa (03/06/25)

Buka HCS 2025, Menteri ESDM Sampaikan 6,2 Juta Lapangan Kerja Terbuka dari Sektor ESDM

Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen menciptakan peluang lapangan pekerjaan di Indonesia. Dari Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan tercipta hingga 6,2 juta lapangan kerja hingga tahun 2030. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat membuka acara *Human Capital Summit* (HCS) 2025, di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor energi tersebut antara lain berasal dari sektor ketenagalistrikan (pembangkit dan transmisi), sektor minerba, dan sektor industri kendaraan listrik.

"Menurut data saat ini terdapat 3.764 jenis pekerjaan di sektor ESDM, 3.277 sudah teridentifikasi dan masuk di data, 487 jenis pekerjaan baru pada tiga sektor utama yang belum terdata," terang Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil mengajak anak-anak muda mempersiapkan diri dengan meningkatkan skill. Ia juga mendorong adanya kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha guna menciptakan peluang yang lebih luas, termasuk melalui peningkatan keahlian tenaga kerja, khususnya di bidang ESDM.

"Persiapkan anak-anak muda skill yang bagus, agar negara punya tujuan berhasil, pengusaha dapat untung, masyarakat daerah juga dihargai, agar mereka juga bisa menjadi tuan di negerinya sendiri," ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat menghadirkan kepastian iklim investasi dan diharapkan dapat memberikan arah yang



jelas dan strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 yang pada akhirnya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Bahlil juga menekankan komitmen Pemerintah dalam mendorong energi baru terbarukan dalam dokumen RUPTL PLN 2025 – 2034. Selain itu, akan dibangun juga jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit-pembangkit listrik EBT ke pusat beban.

"Energi baru terbarukan dalam RUPTL, itu betul-betul kita dorong secara massif, ini

jelas per tahun, per wilayah, kita lihat lima tahun pertama berapa, dan kita akan bangun kurang lebih sekitar, kurang lebih 48 ribu kilometer circuit untuk transmisi atau ribu kilometer," ungkapnya.

Acara The 2nd Human Capital Summit of Energy 2025 dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juni 2025 di *Assembly Hall Jakarta International Convention Center* ini bertujuan untuk menyusun dokumen *policy framework* yang akan menjadi panduan dalam pengembangan SDM di sektor energi. (RA/RO)

Dirjen EBTKE, Eniya Listiani Dewi menyampaikan arahan dalam upacara Pembukaan Program Patriot Energi di Jakarta. Senin (02/06/25)

Patriot Energi, Penggerak Pemerataan Akses Listrik EBT

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen meningkatkan Rasio Elektrifikasi melalui penyediaan akses listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Guna mendukung komitmen tersebut, Kementerian ESDM kembali menyelenggarakan Program Patriot Energi tahun 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan hal tersebut saat Upacara Pembukaan Program Patriot Energi Angkatan IV, Senin (2/6/2025), di Jakarta.

“Anak-anak muda ini yang nantinya akan ditugaskan ke daerah-daerah 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan wilayah Transmigrasi - red) sebagai penggerak potensi EBT yang dimiliki wilayah setempat. Kehadiran Patriot Energi diharapkan dapat menjembatani isu sosial yang menjadi tantangan krusial dalam percepatan pengembangan EBT,” ujar Eniya.

Patriot Energi adalah sebuah program pemberdayaan di bawah Kementerian ESDM dan Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) yang menugaskan sarjana muda ke daerah 4T di seluruh Indonesia. Program ini sebelumnya telah diadakan pada tahun 2015, 2016, dan 2021. Menurut Eniya, Patriot Energi juga merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial.

“Tidak adil kalau masih ada daerah yang belum merasakan listrik, oleh karena itu kita harus mengupayakan keadilan sosial ini sebagaimana diamanatkan dalam sila Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni,” tuturnya.

Ketua Yayasan IBEKA Tri Mumpuni yang juga merupakan Tenaga Ahli Program Patriot Energi Angkatan IV menyampaikan laporan bahwa Program Patriot Energi telah berhasil memberi pembekalan kepada anak muda melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE).

“Patriot Energi Angkatan IV Tahun 2024-2025 akan terdiri dari tahapan persiapan, rekrutmen, pembekalan selama 49 hari, penugasan selama 9 bulan, dan exhibition,” kata Tri Mumpuni.

Ia menambahkan Patriot Energi angkatan IV membuka pendaftaran pada bulan Oktober 2024-Nov 2024 dengan total pendaftar sebanyak 1.459 orang dari 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, tersaring 32 orang yang lulus.

Kementerian ESDM berkomitmen terus mendampingi dan memperkuat peran patriot, baik melalui dukungan teknis, kebijakan maupun kemitraan dengan berbagai pihak. Program Patriot Energi diharapkan dapat membawa dampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di daerah yang membutuhkan. (EW)



Membangun Sistem Kelistrikan Masa Depan: Inklusif, Andal, dan Berkelanjutan

Disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Acara "Energy and Mineral Forum 2025" Kempinski Grand Ballroom, Jakarta

Jakarta, 26 Mei 2025

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan menjadi narasumber dalam acara Energy and Mineral Forum 2025, Jakarta, Senin (26/05/25)

Kementerian ESDM Tegaskan Komitmen Alirkan Listrik Ke Kawasan-Kawasan Khusus

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menyediakan akses listrik untuk wilayah-wilayah khusus seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, serta kawasan komersial dengan tingkat pertumbuhan dan kebutuhan listrik yang tinggi sejalan dengan *Astacita* Presiden.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan saat menjadi panelis dalam *Energy and Mineral Forum 2025* di Jakarta, Senin (26/05/25).

"Nah, jadi pemerintah dalam hal ini memang sesuai visi-misi Presiden Indonesia, Pak Prabowo. Memang kita ingin menonjolkan apa yang dinamakan swasembada dan kemandirian energi," ungkapnya.

Menurut Wanhar, kehadiran Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) menciptakan ruang fleksibilitas dalam sistem kelistrikan nasional yang selama ini sentralistik. Wilus cenderung lebih lincah baik dalam aspek pendanaan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi, terutama ketika PT PLN (Persero) tidak dapat menjangkau atau memenuhi permintaan di wilayah tertentu, terutama sektor pembangkit berbasis batubara di kawasan hilirisasi industri seperti Morowali.

"Nah, biasanya wilus ini lebih fleksibel lah ya dalam hal pendanaan dan sebagainya," ujar Wanhar.

Wanhar juga menjelaskan perlunya penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari pemegang izin Wilus. RUPTL disusun dengan mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Lebih lanjut Wanhar menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang kini telah mencapai lebih dari 99%. Namun masih terdapat tantangan signifikan, terutama untuk menjangkau sekitar 0,1% masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, tantangan juga muncul dari sejumlah daerah yang belum mendapatkan layanan listrik 24 jam akibat keterbatasan pasokan BBM.

"Jadi memang Presiden Prabowo itu setuju dengan yang sudah kami buat bersama PLN terkait roadmap lisdes (listrik perdesaan-red) ini. Mudah-mudahan bisa kita capai, akses listrik yang seluruhnya insya Allah 100%, sehingga tidak ada lagi semacam ketidakadilan bagi saudara kita yang nggak mampu di yang ada di daerah 3T," tegas Wanhar.

Wanhar menerangkan bahwa strategi perluasan akses listrik nantinya akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan (*grid extension*), pembangunan *mini grid/micro grid* untuk kawasan komunal, serta penyediaan sistem tenaga surya skala kecil untuk rumah tangga di wilayah yang tersebar dan sulit dijangkau (*off-grid*). Teknologi seperti SuperSun kini mulai digunakan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agus Puji Prasetyono. Ia menyampaikan bahwa untuk mencapai swasembada energi, Indonesia harus mengimprove tidak saja sistem pembangkit, tapi juga sistem transmisi.

"Sistem transmisi harus kita kembangkan dengan *digital system*, karena Pembangkit semakin banyak, ada pembangkit EBT yang akan bervariasi dari kecil sampai besar, untuk itu perlu digitalisasi," jelasnya.

Ia menerangkan bahwa *smartgrid* menjadi salah satu teknologi kunci dalam transisi energi. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi, keandalan, dan ketahanan energi nasional, sekaligus memungkinkan pelanggan menjadi prosumer atau konsumen sekaligus produsen energi yang dapat terhubung dengan jaringan PLN.

Energi Mineral Forum 2025 merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Energi dan Mineral Festival yang akan digelar pada akhir Juli mendatang. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara regulator dan pelaku industri di sektor energi dan sumber daya mineral guna mempercepat langkah menuju swasembada energi nasional. (RA)

Para presenter memberikan ulasan terhadap buku pada acara Bedah Buku Battle Series di Jakarta, Senin (26/05/25)

Tumbuhkan Minat Baca, Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Kompetisi Bedah Buku *Battle Series*

Kegiatan bedah buku tak mesti identik dengan kegiatan yang serius. Untuk menarik perhatian, kegiatan bedah buku dapat diubah menjadi ajang adu gagasan yang seru dan inspiratif. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan melalui Bedah Buku *Battle Series Batch 1 Tahun 2025*.

Kegiatan ini menghadirkan tiga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ditjen Ketenagalistrikan sebagai presenter pembedah buku.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Literasi yang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Acara ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca sehingga akan memupuk kebiasaan literasi," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat membuka acara, Senin (26/5/2025), di Jakarta.

Dengan mengusung format *battle* atau pertarungan ide, tiga presenter saling beradu argumen dan menyoroti isi buku dari sudut pandang masing-masing.

"Kompetisi ini diharapkan dapat melatih kemampuan berbicara secara *persuasive* dan *public speaking* pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, terutama bagi para pegawai yang menjadi presenter," terang Ida.

Presenter pertama adalah Pranata Komputer Ahli Pertama Ajat Munajat yang mengulas buku "Hidup Itu Murah, yang Mahal Gengsi Kita". Buku ini bercerita tentang bagaimana

gengsi sering kali menyebabkan stres, utang, dan ketidakpuasan dalam hidup. Dalam buku itu disebutkan banyak orang terjebak dalam siklus konsumsi untuk mempertahankan citra sosial, seperti membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren terbaru, padahal tidak benar-benar dibutuhkan.

"Ketika kebutuhan hidup sudah menjadi gaya hidup, maka yang sedang kita beli tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga membeli gengsi," ujar Ajat.

Analisis Kebijakan Ahli Pertama Try Supanji Akbar sebagai presenter kedua mengulas buku berjudul "*The One Thing*". Buku tersebut bercerita tentang pentingnya menetapkan prioritas dan menghindari *multitasking* yang hanya membuang waktu dan energi.

"Melalui strategi dan panduan praktisnya, "*The One Thing*" memberikan pemahaman mendalam bagaimana berfokus pada satu hal terpenting dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas," ujar Panji.

Narasumber terakhir adalah Analisis Hukum Ahli Pertama Rama Aditya Firdaus. Ia mengulas buku berjudul "Asal Usul Jakarta Tempo Doeloe". Buku ini memberikan informasi tentang sejarah asal-usul nama

tempat di seluruh DKI Jakarta, dari sejak era pra-kolonial sampai kemerdekaan.

"Pembaca seakan diajak berkeliling Jakarta untuk menyimak penuturan penulisnya tentang masa lalu tempat-tempat di Jakarta, mulai dari Jakarta Utara sampai ke Jakarta Selatan, dari Jakarta Barat sampai ke Jakarta Timur," ungkap Rama.

Setelah sesi paparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta, kemudian dilanjutkan dengan polling untuk menentukan pemenang Bedah Buku Battle Series Batch 1 tahun 2025. Buku "Asal Usul Jakarta Tempo Doeloe" menjadi pemenang *Book of The Day* dalam *Battle Series Batch* kali ini.

Pendekatan bedah buku battle series yang dikemas lebih segar dan menyenangkan membuktikan bahwa membangun budaya literasi bisa dirancang menarik untuk mendukung birokrasi yang adaptif dan cerdas. (RA)

Dirjen Ketenagalistrikan memberi sambutan dalam acara Schneider Innovation Day for Electrician 2025, Jakarta, Kamis (22/05/25)

Pemerintah Siapkan Regulasi dan Gencarkan Sosialisasi GPAS untuk Tingkatkan Keselamatan Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menegaskan komitmennya dalam memperkuat keselamatan ketenagalistrikan. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah penerapan Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS) sebagai perangkat pengaman instalasi listrik.

Upaya ini diiringi dengan sosialisasi masif dan penyusunan regulasi inklusif guna menekan angka kecelakaan dan kebakaran akibat listrik.

"Listrik selalu menjadi faktor utama penyebab kebakaran di area perumahan. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk mengambil langkah strategis dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan di level rumah tangga," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, pada *Schneider Innovation Day for Electrician 2025* di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Menurut Jisman, GPAS mampu memberikan perlindungan dari bahaya arus sisa yang dapat menyebabkan kecelakaan listrik maupun kerusakan peralatan elektronik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik instalasi melalui sosialisasi yang menjangkau pasar, gedung pemerintahan, serta pengembang perumahan.

"Diharapkan ke depan angka kecelakaan dan kerugian materiil akibat risiko kelistrikan dapat dikurangi," ungkap Jisman.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan,

Wahyudi Joko Santoso menambahkan, pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi yang mendukung penerapan keselamatan ketenagalistrikan secara inklusif.

"Membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi arus sisa menjadi bagian penting dari strategi ini, selain regulasi yang tengah disusun," ujar Wahyudi.

Dalam kesempatan yang sama, *President Director Indonesia & Timor-Leste Schneider Electric*, Martin Setiawan menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia menyampaikan Schneider Electric berkomitmen mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi sistem kelistrikan melalui edukasi penerapan GPAS di tingkat nasional.

"GPAS bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menyangkut perlindungan nyawa dan aset masyarakat. Karena itu, membekali para instalatir dengan pengetahuan teknis yang tepat menjadi prioritas kami, agar mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem kelistrikan hunian yang aman dan andal," ungkap Martin.

Selain diskusi dan pemaparan materi,

peserta juga diberikan pelatihan teknis mengenai cara kerja dan pemasangan GPAS untuk mengantisipasi arus bocor, salah satu penyebab utama kebakaran.

Acara ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah bersama Schneider Electric Indonesia dalam menyosialisasikan penerapan GPAS kepada teknisi listrik dan badan usaha inspeksi listrik khusus di wilayah DKI Jakarta. Ke depan, sosialisasi serupa akan diperluas ke berbagai daerah besar di Indonesia guna mengakselerasi penerapan keselamatan ketenagalistrikan secara nasional. (JG)



Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangan PLTN di Indonesia

Pemerintah melalui sinergi Kementerian/Lembaga tengah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu dalam diskusi *"Structuring Nuclear Power Projects: Global Lessons for Indonesia's Opportunity"* di Kantor PT PLN Pusat, Jakarta, Jumat (16/05/2025).

Jisman menjelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan sejumlah dokumen strategis sektor energi diantaranya Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah mendapat persetujuan DPR dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM. Jisman mengatakan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 sudah berada di tahap akhir penyusunan dan siap ditetapkan oleh Menteri ESDM.

"RUPTL akan dirilis langsung oleh Menteri ESDM, kemudian dilakukan sosialisasi. Dokumen ini disusun untuk mendukung program pemerintah, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8%," ujar Jisman.

Dalam draft RUPTL, PLTN disebutkan masuk dalam rencana 10 tahun ke depan dengan

kapasitas 500 MW. Meski demikian, Jisman mengakui bahwa pengembangan PLTN masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait isu keselamatan dan penerimaan masyarakat.

"Kita perlu belajar dari negara lain seperti India dan Bangladesh yang sudah lebih dulu mengembangkan PLTN," tambahnya.

Jisman mengungkapkan, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan PLTN *floating* (mengapung) untuk daerah terpencil di Indonesia Timur yang selama ini bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar minyak (BBM).

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan, pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

"Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerjasama

internasional, dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN," jelas Haendra.

Sementara itu, Troy Edwards, *Energy and Infrastructure Expert* dari Allen & Overy Shearman London, menyebutkan bahwa tenaga nuklir dapat menjadi salah satu solusi dalam strategi ketahanan energi dan pencapaian NZE.

"Bagi banyak negara, tenaga nuklir juga menawarkan peluang untuk pengembangan kemampuan teknologi dan industri. Selain itu tenaga nuklir merupakan fitur utama dalam strategi keamanan energi yang menunjang tujuan NZE," papar Troy.

Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ESDM, BAPETEN dan seluruh jajaran serta perwakilan perusahaan yang bernaung di bawah PT.PLN (Persero). Acara yang diselenggarakan oleh PLN ini merupakan bentuk sarana peningkatan identifikasi dan analisis strategis mengenai langkah-langkah persiapan legal, komersial, dan sistem kelembagaan untuk pengembangan PLTN di Indonesia.(JG)



Dirjen Ketenagalistrikan berfoto bersama narasumber dan jajaran PT PLN pada acara Discussion Session : Structuring Nuclear Power Project Global Lesson for Indonesia's Opportunity, Jakarta, Jumat (16/05/25)

Ditjen Ketenagalistrikan dan JICA Gelar *Technical Workshop for Energy Transition*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong percepatan transisi energi nasional untuk mencapai target net zero emission. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar *Technical Workshop for Energy Transition* dengan tema *Ammonia/Biomass Co-Firing for Boiler* yang digelar pada Rabu (7/5/2025) di Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.

Koordinator Perencanaan Pembangkitan

Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Pramudya saat membuka workshop menyampaikan, saat ini Indonesia tengah berupaya melakukan transisi sistematis menuju masa depan energi yang lebih hijau melalui perencanaan strategis, inovasi teknologi, dan dukungan kebijakan.

"Indonesia siap mencapai sistem kelistrikan berkelanjutan yang menyeimbangkan tanggung jawab lingkungan dengan pembangunan ekonomi," papar Pramudya.

Dalam paparannya Pramudya menyampaikan penyediaan listrik ke depan akan semakin didominasi oleh sumber energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, pasang surut, hidro, bioenergi, panas bumi, amonia hijau (NH₃) dan hidrogen hijau (H₂). Beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara secara bertahap akan digantikan oleh amonia hijau mulai tahun 2045, sementara pembangkit berbahan bakar gas akan digantikan oleh hidrogen hijau pada tahun 2051.

"Kita ingin mengelaborasi satu per satu teknologi kita berdasarkan RUKN (Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional -red)" jelas Pramudya.

Lebih lanjut Pramudya menjelaskan untuk pembangkit listrik batu bara akan dilengkapi dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, dan akan menggabungkannya dengan biomassa, sebagai bagian dari upaya mencapai nol emisi di sektor pembangkitan listrik.

Seiring rencana beralihnya Indonesia dari bahan bakar fosil, sumber energi alternatif rendah karbon akan diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Energi nuklir yang akan dikembangkan menyediakan listrik yang stabil dalam skala besar, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Amonia Hijau untuk Batubara 100% juga masuk dalam perencanaan yang akan diterapkan pada tahun 2045.

Narasumber workshop *Senior Manager Indonesia Business Development Headquarters IHI Corporation*, Ahmad Iqbal menjelaskan penggunaan biomassa terus meluas karena meningkatnya permintaan untuk mengurangi emisi Co₂. Pihaknya terus berfokus pada pengembangan teknologi pembakaran biomassa untuk mengurangi emisi Co₂ (netral karbon) dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Menurut Iqbal Negara Indonesia kaya akan berbagai tipe biomassa, seperti *woody chip*, *woody pellet*, *sawdust*, *agricultural waste* seperti *palm waste*, *coffee*, *rice husk* maupun *rice straw*.

"Ini sudah saatnya kita mendekeati energy transition tersebut," jelas Iqbal.

Menurut Iqbal masing-masing biomassa memiliki tipe dan juga karakteristik yang perlu dipertimbangkan saat melakukan biomass firing pada pembangkit PLTU. Dalam pengembangan teknologi biomassa ada beberapa hal yang harus dipastikan, diantaranya penerapan teknologi biomassa firing ini tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap performa boiler pada pembangkit.

Workshop ini diikuti oleh peserta dari Setjen Dewan Energi Nasional (DEN), Ditjen EBTKE, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, dan IHI Corporation. (RO)

Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik membuka acara *Technical Workshop for Energy Transition* dengan tema *Ammonia/Biomass Co-Firing for Boiler*, Jakarta, Rabu (07/05/25)

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memberikan sambutan dalam acara 23rd ASEAN Forum on Coal (AFOC) Council Meeting, Bogor, Rabu (07/05/2024)

Komitmen ASEAN Mengembangkan Energi Rendah Emisi Melalui Teknologi Bersih

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama negara-negara di ASEAN terus berkomitmen menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang menuju transisi energi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi bersih dan inovatif dalam pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara “23rd ASEAN Forum on Coal (AFOC) Council Meeting” di Bogor, Rabu (07/05/2024).

“Saat ini, kita memasuki babak baru di mana batubara dapat dikembangkan dengan nilai yang lebih tinggi, melalui penerapan teknologi yang bersih dan inovatif,” ujar Ida.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa kapasitas listrik terpasang di negara-negara ASEAN sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil, yang terdiri dari batubara dan gas. Keduanya menjadi penopang beban dasar dalam sistem energi karena keunggulannya dalam hal ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan yang hingga kini masih sulit ditandingi oleh sumber daya lainnya.

“Namun demikian, kita juga menyadari bahwa pemanfaatan batubara sebagai sumber energi utama di kawasan kita memerlukan pengembangan lebih lanjut karena kita telah berkomitmen untuk mencapai masa depan yang lebih rendah karbon,” jelas Ida.

Ida juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menyusun dokumen perencanaan energi primer diantaranya Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih ramah lingkungan.

“Saat ini, Indonesia telah merumuskan dokumen perencanaan energi primer yang tidak hanya menyajikan proyeksi permintaan dan pasokan, namun juga memandu transformasi menuju sistem ketenagalistrikan yang lebih ramah lingkungan dan lebih dapat diandalkan,” ungkap Ida.

Dalam kesempatan yang sama, *Chief Executive Officer Energy Commission* Malaysia Puan Siti Safinah Salleh mengungkapkan bahwa dalam diskusi ini, negara-negara ASEAN tidak dapat mengabaikan realitas perubahan iklim. Oleh karena itu, diskusi harus berfokus pada rekonsiliasi antara peran batubara yang berkelanjutan dengan kelestarian lingkungan.

“Teknologi batubara yang lebih bersih seperti pembangkit listrik rendah emisi serta *carbon capture and storage* tidak lagi menjadi pilihan, teknologi-teknologi tersebut kini menjadi sangat penting bagi kita untuk melangkah ke masa depan,” kata Siti.

Senada dengan Siti, *Senior Manager of ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)* Beni Suryadi menyatakan bahwa evolusi industri batu bara rendah emisi saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Industri batu bara harus berevolusi, transisi sektor batu bara ke model yang lebih bertanggung jawab, rendah emisi dan berkelanjutan tidak hanya diperlukan, tetapi juga sangat mendesak,” ujar Beni.

Dalam mewujudkan cita-cita ASEAN untuk mencapai target transisi energi, diperlukan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai investor, lembaga akademis dan penelitian sebagai inovator, serta masyarakat sebagai kontributor dalam mendukung pengembangan energi masa depan yang lebih bersih

“Bersama-sama, kita dapat menciptakan sistem energi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan dan terjangkau untuk menjawab tantangan di masa depan,” tutup Ida.

ASEAN Forum on Coal (AFOC) merupakan forum yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk melakukan dialog dan pertukaran informasi berbagai isu terkait batubara, termasuk kerjasama, perkembangan teknologi dan kebijakan terkait industri batubara. Selain negara-negara ASEAN, organisasi lain seperti Global CCS Institute, JCOAL, ERIA, FutureCoal, CETERI juga turut berkontribusi dalam diskusi untuk mewujudkan cita-cita energi ASEAN. Kementerian ESDM cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menjadi tuan rumah pelaksanaan “23rd ASEAN Forum on Coal (AFOC) Council Meeting” bekerjasama dengan *ASEAN Centre for Energy (ACE)* dan Sekretariat ASEAN. (U)

Dirjen Ketenagalistrikan melakukan rapat mengenai kesiapan pabrik GPAS, Tangerang, Rabu (20/04/25)

Dorong Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan, Dirjen Gatrik Tinjau Kesiapan Industri GPAS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong penerapan keselamatan ketenagalistrikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran akibat listrik. Mendukung hal tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu hadir langsung ke beberapa pabrik peralatan listrik untuk meninjau kondisi kesiapan industri Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS) untuk masyarakat umum.

Dalam kunjungan ke PT Chint Indonesia dan PT Manufaktur Hijau Indonesia pada Rabu (30/04/2025) di Tangerang, Banten, Jisman menyampaikan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mendorong para pabrik GPAS meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas distribusi produk secara nasional agar dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau.

Ia mengimbau agar perusahaan penyedia peralatan listrik memperhatikan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan pada sektor ketenagalistrikan.

"SNI dan TKDNnya harus dipenuhi, supaya bisa kita gunakan. Itu kan harus ada persyaratan SNI dan TKDN kalau pengadaan," tegas Jisman.

Seperti diketahui TKDN sektor ketenagalistrikan bertujuan mendorong penggunaan produk dan jasa lokal dalam proyek ketenagalistrikan, meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada impor.

Operasional Director PT Manufaktur Hijau Indonesia, Yemimita menjelaskan, pihaknya selaku salah satu manufaktur electrical di Indonesia terus berupaya berinovasi pada

produksi utamanya terhadap kesiapan produk yang mampu mencegah arus bocor pada instalasi.

"Untuk MCCB kami juga ber-TKDN dan Sudah SNI," ujar Yemimita.

Pada kunjungan ke PT. ABB Sakti Industri dan PT. Schneider Electric Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025), Jisman menegaskan bahwa semakin besar daya suatu instalasi listrik maka semakin besar arus bocornya. Oleh karena itu penggunaan GPAS sangat penting untuk mencegah arus bocor dan memberikan rasa aman.

Dirjen Ketenagalistrikan juga mengimbau produsen peralatan listrik untuk bersiap-siap meningkatkan produksi GPAS ketika aturan penerapannya sudah diresmikan oleh Pemerintah. Ia menekankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik akan memasukkan komponen penerapan GPAS untuk mengantisipasi kejadian yang tidak

diinginkan.

"Kita galakkan terus bagaimana pentingnya keselamatan itu," tegas Jisman.

Direktur PT. ABB Sakti Industri, Linus Tan menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong pemenuhan TKDN di berbagai lini produksinya.

"Indonesia mempunyai banyak *resources* teknikal yang cukup bagus dan cukup memadai. Saya kira itu hal yang harus kita lakukan terus," ungkap Linus.

Dalam kunjungan tersebut, Jisman didampingi perwakilan Asosiasi Lembaga Inspeksi Tegangan Rendah (ASLITER), Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan (Bangsang), dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI). (RO/AT)



Pranata Humas Ahli Muda Ditjen Ketenagalistrikan memberikan ulasan mengenai buku tentang kehumasan dalam acara Kopdar Komunitas Belajar Jakarta. Selasa (29/04/25)

Tingkatkan Budaya Literasi, Ditjen Ketenagalistrikan Kini Punya Komunitas Belajar

Guna memperkuat budaya literasi di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara resmi meluncurkan Komunitas Belajar (KEJAR) sebagai wadah baru pegawai dalam mendiskusikan dan berbagi pengetahuan tentang buku. Pertemuan pertama KEJAR berlangsung di Learning Space Perpustakaan Ditjen Gatrik, Jakarta, Selasa (29/04/2025).

Menurut Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik Ditjen Ketenagalistrikan, Pandu Satria Jati, KEJAR merupakan ruang berkumpul bagi para pegawai Ditjen Gatrik yang memiliki minat dan kecintaan terhadap membaca dan literasi. Melalui komunitas ini, diharapkan tercipta interaksi positif antar anggota untuk memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan, serta menginspirasi masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi.

Menurutnya, KEJAR merupakan inovasi baru dari teman-teman pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan dengan membuat wadah dikusi di grup whatsapp sehingga anggotanya bisa berbagi dan berdiskusi terkait minat baca dan literasi.

“Untuk meningkatkan literasi atau kemampuan membaca. Jadi di grup (whatsapp -red) itu nanti silahkan teman-teman gunakan sebaik mungkin untuk berdialog, berdiskusi, untuk sharing terkait dengan literasi tentunya,” jelas Pandu.

Pustakawan Ahli Madya Ditjen Ketenagalistrikan, Dina Andriani dalam acara tersebut menjelaskan komunitas belajar fungsinya sebagai ruang berkumpul dan berbagi minat dan kecintaan pada literasi

khususnya pada pegawai Ditjen Gatrik dengan harapan akan terus meluas sampai ke masyarakat.

“Diharapkan bisa jadi salah satu penggerak literasi masyarakat, memfasilitasi interaksi antara anggota yang punya minat akan literasi, sehingga membantu masyarakat untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan mereka” ujarnya.

Kopi darat perdana KEJAR diisi pemaparan hasil membaca buku oleh tiga Pranata Humas di Ditjen Ketenagalistrikan. Anggita Miftah Hairani (Pranata Humas Ahli Muda) meresensi buku Media dan Opini Publik, Utami Hikmaasih (Pranata Humas Ahli Muda) meresensi buku Komunikasi yang Mengubah Dunia, dan Agnes Tania (Pranata Humas Ahli Muda) meresensi buku Sukses Berkomunikasi.

Anggita Miftah Haerani memaparkan sebuah buku berjudul media dan opini publik dari penulis Erianto, terbitan Raja Grafindo Persada di Depok. Menurutnya, garis besar buku tersebut ada tiga, yang pertama adalah agenda setting. Agenda setting itu bagaimana media bisa menciptakan isu. Kemudian yang kedua framing, bagaimana media itu melakukan pembingkai. Dan yang ketiga adalah priming, bagaimana

media mengarahkan pandangan publik.

“Teori agenda setting menyatakan bahwa media punya pengaruh dalam menentukan apa yang dianggap penting oleh publik,” Papar Anggi.

Kopi darat Komunitas Belajar akan dilaksanakan dalam jangka waktu empat bulan sekali, dengan tema diskusi yang dapat diusulkan dan disepakati oleh para anggotanya. (RO)

Komisi XII DPR RI rapat bersama jajaran PT. PLN dalam acara Kunjungan Kerja Reses di PLTU Batang, Jawa Tengah, Kamis (24/04/25)

DPR RI dan KESDM Tinjau Kontribusi PLTU Batang dalam Ketahanan Energi Nasional

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didampingi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kunjungan kerja reses ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/04/025).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung operasional dan kontribusi PLTU Batang terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan dukungan infrastruktur kelistrikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

“Pembangkit berkapasitas 2 x 1000 megawatt (MW) ini memainkan peran strategis dalam menopang keandalan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali),” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Ia mengatakan PLTU Batang memiliki teknologi *ultra super critical* yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi tinggi, serta dukungan tenaga kerja lokal sebanyak 99%, pembangkit ini menjadi simbol kemajuan industri energi di Indonesia. Ia juga memuji keandalan dan inovasi yang diusung PLTU Batang.

“Ini pembangkit kategori modern, kapasitasnya besar, mencapai 2.000 megawatt, dan proses pembakarannya nyaris sempurna. Debu dan emisi karbonnya sangat minim,” ujar Sugeng.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Hasidh Nazif menekankan pentingnya menjaga tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

“PLTU Batang berhasil mengombinasikan teknologi maju dengan biaya operasional yang tetap efisien, sehingga mampu mendukung kebutuhan listrik dengan harga yang bersahabat,” jelasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Muh Haris mengingatkan pentingnya pengawasan lingkungan yang ketat dan partisipatif. Ia mendorong agar pemantauan dampak lingkungan dilakukan secara rutin dan melibatkan masyarakat.

“Kami ingin PLTU ini bukan hanya menjadi pilar ketahanan energi, tapi juga menjadi teladan dalam hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Program CSR harus relevan dengan kebutuhan warga: pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan ekonomi produktif. Jangan sekadar simbolik,” tegas Haris.

PLTU Batang, Simbol Kemajuan Energi Nasional

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang mencatatkan sejarah baru di sektor ketenagalistrikan Indonesia. Sebagai proyek

pembangkit listrik berkapasitas besar, PLTU Batang menjadi yang pertama di Indonesia yang menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor ketenagalistrikan nasional.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia bersama PT PLN (Persero), dengan dukungan kerja sama bilateral dari Pemerintah Jepang. Pendekatan KPBU ini menjadi tonggak penting dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur energi, membuka peluang lebih luas bagi keterlibatan swasta dalam proyek-proyek strategis nasional.

PLTU Batang juga tercatat dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan merupakan bagian dari program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. PLTU Batang juga merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengintegrasikan teknologi maju, efisiensi tinggi, dan prinsip keberlanjutan dalam membangun masa depan energi yang lebih baik. (AT)

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XII DPR RI

Masa P... un Sida...
24-26... BAJO P...

Ketua DPR RI Komisi XII, Bambang Pattijaya memimpin Rapat Kunjungan Kerja Reses Anggota DPR RI Komisi XII di Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/04/2025)

Tinjau Labuan Bajo, Komisi XII DPR RI dan ESDM Dorong Pemanfaatan Energi Bersih

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kunjungan kerja reses ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/04/2025).

Labuan Bajo, sebagai salah satu Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia, menjadi fokus utama pengembangan pariwisata nasional. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik berbasis energi bersih menjadi kebutuhan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pattijaya. Bambang juga menyoroti ketersediaan listrik yang jumlahnya signifikan untuk mendukung investasi di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata yang terus berkembang. Menurut Bambang Provinsi NTT memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup tinggi dari energi bayu dan surya.

"Bahwa yang diperlukan itu *clean energy*. *Clean energy* itu pasti dari energi baru terbarukan," tegas Bambang.

Daerah Pariwisata yang memiliki *clean energy* dinilai Bambang memiliki nilai plus sehingga ia mengimbau semua pihak agar dapat mengakselerasikan Labuan Bajo sebagai daerah super prioritas pariwisata yang memang memiliki daya unggul.

Bambang menyampaikan saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) masih mendominasi penyediaan listrik

di NTT. Sehingga perlu perlu disiapkan langkah-langkah mitigasi dan transisi di dalam memenuhi kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan mengurangi ketergantungan kita pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu. Ia menyampaikan sistem kelistrikan di NTT saat ini terdapat dua sistem besar, yaitu sistem Timor dan sistem Flores, kemudian ada 68 sistem yang *isolated* yang tidak terhubung dengan jaringan listrik nasional dan semuanya dilayani oleh diesel.

Jisman menyampaikan bahwa PLN saat ini tengah mendorong program dedieselisasi, yakni pengalihan PLTD ke sumber EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tujuan utama program ini adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mendukung transisi energi.

"Dedieselisasi ini adalah PLTS ditambah dengan baterai atau hybrid Bapak-Ibu sekalian, tapi PLTD-nya, Dieselnnya masih digunakan untuk backup, karena memang mungkin belum bisa 24 jam," terang Jisman.

Jisman juga menyampaikan saat ini sudah ada roadmap listrik pedesaan untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di NTT, antara lain melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"NTT ini kan terendah untuk rasio elektrifikasinya jadi saya mencoba untuk memberikan anggaran disini agak lebih supaya melompat dulu rasio elektrifikasinya, tidak tertinggal dengan Provinsi lain," jelas Jisman.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan pertumbuhan pemakaian listrik di Pulau Flores, khususnya Labuan Bajo meningkat sangat pesat, bahkan melampaui pertumbuhan di Provinsi Bali. Ia menambahkan pihaknya juga sedang melakukan studi terkait potensi hutan bangun di Flores yang dapat menambah *energy mix* dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Oleh karena itu, kami benar-benar sangat memperhatikan kondisi kelistrikan di Flores ini, khususnya Labuan Bajo, ini menjadi hal yang sangat penting," jelas Adi. (RO)

Habis Gelap Terbitlah Terang, Kiprah Kartini Masa Kini dalam Energi Bersih

Suasana *Learning Space* Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan pagi itu lebih semarak. Beberapa panitia dan pengisi acara berpakaian baju adat dari berbagai daerah di Nusantara. Ada yang mengenakan adat bali, jawa, bugis, ada pula yang berpakaian adat betawi. Baru kali ini hari kartini 21 April diperingati secara khusus di Ditjen Ketenagalistrikan.

Limapuluhan peserta yang didominasi perempuan berkumpul dalam acara sharing session Ngopi@Perpus Gatrik bertema Peringatan Hari Kartini: "Keterlibatan Perempuan dalam Energi Bersih". Acara ini diselenggarakan khusus oleh Ditjen Ketenagalistrikan dalam rangka memperingati Hari Kartini, pada Senin (21/4/2025).

Tepat pukul sepuluh pagi, acara dimulai. Lantunan lagu wajib nasional Ibu Kita Kartini Terdengar. Lima puluhan peserta yang hadir di tempat itu ikut menyanyikan lagu ciptaan WR Supratman itu. Suasana semakin haru. Semangat R.A. Kartini seolah hadir di ruangan tersebut. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan dilanjutkan oleh para Kartini masa kini di bidang energi.

Salah satu narasumber yang hadir, Inspektur Migas sekaligus pendiri Women in Energy Indonesia (WEID), Rinna S. Sijabat, menekankan pentingnya peran perempuan dalam mensukseskan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. Rinna menjelaskan, organisasi yang ia dirikan berfokus pada menginspirasi, memberdayakan, dan mengapresiasi perempuan Indonesia untuk menjadi pemimpin yang memberikan dampak positif bagi sektor energi.



Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan memberikan sambutan dalam acara Ngopi@Perpus Gatrik, Jakarta, Senin (21/04/25)



la mengungkapkan saat ini partisipasi perempuan di sektor energi baru dan terbarukan telah mencapai 32%, lebih tinggi dibandingkan sektor energi tradisional seperti minyak dan gas bumi yang hanya sekitar 22%. Namun secara keseluruhan, keterlibatan perempuan di sektor energi masih berada pada kisaran 20%.

“Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam transisi energi, ada tiga hal yang perlu ditekankan seperti melibatkan semua talenta termasuk perempuan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan memastikan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran aktif dalam mendorong perubahan,” ujar Rinna.

Pada kesempatan yang sama, *Corporate Component 2 Project* ENTREV, Duwi Pratiwi, memaparkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai sebagai bagian dari proses transisi energi di sektor transportasi.

“Partisipasi perempuan masih timpang, terutama di level teknis, pengambil kebijakan, dan kepemimpinan sektor energi. Jika kita ingin transisi energi yang adil dan berkelanjutan, maka transisi ini juga harus inklusif secara gender,” tegas Duwi.

Dalam presentasinya, Duwi menjelaskan bahwa perempuan merupakan pengguna energi sekaligus pengambil keputusan dalam rumah tangga, transportasi, dan komunitas. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses transisi energi sangat krusial.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Nuryatin Finahari menyampaikan bahwa kegiatan ini menyoroti pentingnya peran perempuan dalam sektor energi bersih, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara karir profesional dan peran keluarga.

“Ini menjadi perhatian kita, khususnya bagi generasi ibu masa kini, yang harus diingat yaitu meski kita bekerja jangan lupa tugas utama kita sebagai ibu dari anak-anak kita dan istri dari suami kita itu yang harus jadi perhatian kita,” ujar Ida.

Lebih lanjut, Ida menyampaikan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam mengelola rumah tangga, tetapi juga berkontribusi besar dalam menanamkan budaya hemat energi. Perempuan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, mendorong transisi energi yang lebih aplikatif dan berdampak langsung.

Peringatan Hari Kartini menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender di Indonesia. Ida berharap, peringatan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa dan kaum perempuan.

Sharing session Ngopi@Perpus Gatrik merupakan bagian dari forum literasi informasi di bidang ketenagalistrikan yang secara rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Selain kegiatan ini, terdapat pula program-program lainnya seperti Bedah Buku, Bedah Paper, *Battle Series*, dan Alumni Talk. (JG/AT/RO)



Koordinator Investasi dan Kerjasama Ketenagalistrikan KESDM bersama Duta Besar Finlandia untuk Indonesia H.E. Pekka Kaihilahti dalam acara Indonesia-Finland Sectoral Working Group (SWG) on Flexible Energy System for Indonesia and Smart Grid, Jakarta, Rabu (23/04/25)



Kolaborasi Indonesia dan Finlandia Dorong Pemanfaatan Energi Bersih

Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan energi bersih sebagai langkah mencapai target nol emisi pada tahun 2060. Upaya tersebut dilakukan dengan melanjutkan kerja sama dengan berbagai negara, salah satunya Finlandia sesuai Nota Kesepahaman kedua negara di Bidang Kerja Sama Energi Bersih, Berkelanjutan, Terbaru, dan Efisiensi Energi.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Investasi dan Kerjasama Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Budi Santoso dalam acara *Indonesia-Finland Sectoral Working Group (SWG) on Flexible Energy System for Indonesia and Smart Grid* pada Rabu (23/04/2025) di Jakarta.

Menurut Budi, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, Pemerintah Indonesia maupun Finlandia telah berhasil menyelenggarakan beberapa forum bisnis dan kelompok kerja untuk mendukung transisi Indonesia menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

“Ruang lingkup kerja sama Indonesia dan Finlandia adalah transisi energi meliputi sektor ketenagalistrikan, sektor transportasi, dan sektor infrastruktur, energi terbarukan meliputi energi dari sampah, energi biomassa, dan energi angin, transportasi netral karbon, dan jaringan cerdas,” terang Budi.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa saat ini Indonesia berada pada tahap krusial transformasi sektor energi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk itu, Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

meningkatkan kapasitas pembangkitan energi terbarukan dari sumber tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi, mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara, menggunakan teknologi seperti CCS/CCUS, hidrogen, nuklir, dan jaringan pintar.

Pemerintah Indonesia saat ini juga terus berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan infrastruktur pendukungnya, memanfaatkan biofuel, serta meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, bangunan, dan transportasi.

“Kami yakin pencapaian *Net Zero Emissions* pada tahun 2060—atau lebih cepat—akan mungkin terwujud melalui upaya dan kolaborasi kolektif kita,” jelas Budi.

Hadir pada kesempatan itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia H.E. Pekka Kaihilahti. Ia menyampaikan, saat ini sistem energi Finlandia dikenal secara global karena keandalannya yang tinggi. Finlandia menerapkan integrasi energi terbarukan yang efisien serta menetapkan tolok ukur untuk pasokan daya yang stabil dan berkelanjutan.

“Perusahaan Finlandia, seperti Daltia dan Maune, telah memelopori pembangkit listrik bertingkat yang secara fleksibel beralih antara biomassa, limbah, dan bahan bakar bersih,” jelas Pekka.

Menurut Pekka dengan memanfaatkan keahlian Finlandia dalam pembangkitan multi-bahan bakar dan efisiensi jaringan, Indonesia dapat meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan kemajuan sistemnya menuju masa depan energi yang lebih bersih dan tangguh.

Subkoordinator Investasi Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M. Kuncoro menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, kita menyadari bahwa lokasi potensi energi terbarukan tersebut terlalu tersebar dari pusat-pusat permintaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat infrastruktur transmisi untuk mengalihkan listrik dari daerah-daerah yang kaya akan sumber energi terbarukan ke pusat-pusat permintaan di Jawa.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, kami akan mengembangkan interkoneksi dengan menghubungkan 4 (empat) pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yang kami sebut sebagai *Indonesian Supergrid*,” papar Kuncoro.

Lebih lanjut Kuncoro menjelaskan pengembangan Indonesia *Supergrid* tidak hanya akan menyalurkan pasokan potensial dari sumber-sumber tenaga air, tetapi juga meningkatkan penetrasi potensi besar tenaga surya dan angin. (RO)



Jisman P. Hutajulu

Director General of Electricity (Ditjen Gatrik)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu memberi sambutan dalam acara Hydrogen Ecosystem Summit 2025 Jakarta, Rabu (16/04/2025)

Indonesia Tegaskan Komitmen Pemanfaatan Green Hydrogen sebagai Pilar Transisi Energi Masa Depan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu menegaskan komitmen Indonesia dalam mengakselerasi pemanfaatan green hydrogen sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Hal tersebut ia sampaikan Saat menyampaikan pesan kunci di *Global Hydrogen Ecosystem Summit 2025* yang digelar di Jakarta, dengan tema *"The Role of Hydrogen in the Power Sector and the Long-Term Plans"* Rabu (16/04/2025).

Jisman menjelaskan bahwa kebijakan penyediaan tenaga listrik Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan secara merata, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini menjadi bagian dari upaya besar menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060, sembari menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

"Indonesia telah menyusun tiga dokumen utama perencanaan energi yaitu KEN, RUKN, dan RUPTL. Perencanaan ini tidak hanya memproyeksikan kebutuhan energi, tetapi juga merefleksikan transformasi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau, andal, dan berkelanjutan," ujar Jisman.

Kebutuhan listrik nasional diperkirakan akan menembus 1.800 TWh pada 2060, dengan konsumsi per kapita mencapai 5.038 kWh. Menjawab tantangan ini, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit sebesar 443 GW, dengan bauran energi yang didominasi oleh energi terbarukan.

"Dari total kapasitas tersebut, 41,6% berasal dari energi terbarukan variabel yaitu surya dan angin yang ditopang oleh penyimpanan

energi sebesar 34 GW, sedangkan 58,4% lainnya dari energi terbarukan stabil, serta pembangkit fosil berteknologi *Carbon Capture and Storage*," jelasnya.

Green hydrogen dan green ammonia disebut Jisman akan memainkan peran kunci dalam bauran energi masa depan. Pemerintah menetapkan penggunaan *green ammonia* pada PLTU dan 100% *green hydrogen* pada PLTG, dimulai dengan retrofit pembangkit gas sebesar 4 GW di lima wilayah utama: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Potensi produksi green hydrogen akan dikembangkan dari pembangkit energi terbarukan, termasuk PLTA Membramo di Papua, PLTS di Nusa Tenggara Timur, dan PLTN di Kalimantan Barat. Seluruh strategi ini tidak hanya ditujukan untuk sektor ketenagalistrikan, tetapi juga diperluas ke sektor industri dan transportasi.

Dalam kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Noer Adi Wardoyo menyampaikan beberapa manfaat potensial dalam menggunakan hydrogen sebagai bahan bakar. Hydrogen idianggap sebagai sumber energi yang bersih, karena tidak menghasilkan emisi karbon, emisi dioksida sulfur, dan lain-lain yang menyebabkan polusi pada lingkungan.

Noer mengatakan, hydrogen juga memiliki potensi untuk dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk air, gas alam, biomasa. Selain itu hydrogen dapat dikumpulkan dengan mudah dalam bentuk gas liquefied atau kompres, yang membuatnya mudah untuk dihasilkan dan digunakan.

"Dengan strategi yang tepat, Indonesia akan memperoleh keuntungan besar. Selain manfaat langsung dari pengurangan emisi karbon, penggunaan energi ini juga akan menyebabkan penemuan pekerjaan baru dan peningkatan kualitas lingkungan," tambah Noer.

Selain pembangunan infrastruktur energi baru, pemerintah juga mendorong integrasi sistem kelistrikan melalui supergrid antar dan intra-pulau, serta pengembangan pembangkit load follower guna memastikan stabilitas pasokan energi.

"Indonesia siap menjadi pemimpin transisi energi di kawasan dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim global. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat untuk bersama-sama mempercepat pengembangan hydrogen sebagai solusi energi bersih dan masa depan yang berkelanjutan," tutup Jisman. (JG)



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka Global Hydrogen Summit (GHES) 2025, Jakarta, Selasa (15/04/25)

Buka *Global Hydrogen Summit 2025*, Menteri ESDM Tegaskan Pemanfaatan Hidrogen sebagai Upaya Kedaulatan dan Swasembada Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka *Global Hydrogen Summit (GHES) 2025* pada Selasa (15/04/2025) di Jakarta. Dalam sambutannya Bahlil menegaskan bahwa pemanfaatan hidrogen merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai kedaulatan dan swasembada energi.

“Bapak Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita yang kedua maupun yang kelima, yang pertama itu berbicara tentang kedaulatan swasembada energi, di dalamnya di situ adalah energi hijau, energi baru terbarukan dan hidrogen merupakan bagian daripada visi besar Bapak Presiden,” terang Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, pengembangan hidrogen dilakukan secara komprehensif dengan program hilirisasi yang juga merupakan Asta Cita Presiden.





“Asta Cita Bapak Presiden salah satu diantaranya juga adalah berbicara tentang hilirisasi dan hilirisasi ini merupakan salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi nasional kita,” papar Bahlil.

Menteri ESDM menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam cukup besar, untuk hidrogen bahan bakunya ada tiga yang dimiliki Indonesia, yaitu batubara, gas, dan air.

“Indonesia merupakan negara dengan cadangan batubara terbesar nomor 6 di dunia, dan 10 tahun ke depan produksi gas kita akan naik dua kali lipat dimana sumur-sumur gas baru akan lebih diprioritaskan kepada market dalam negeri dan hilirisasi termasuk hidrogen, serta air yang cukup karena negara kita adalah negara kepulauan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi dalam laporannya menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah meluncurkan dokumen strategi hidrogen Nasional pada Desember 2023. Pemerintah menyusun strategi untuk memanfaatkan hidrogen dengan 3 fokus, yaitu hidrogen yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan, hidrogen yang akan mendukung upaya dekarbonisasi dengan mengembangkan pasar domestik dan sebagai komoditi hidrogen dan turunannya akan bisa diekspor ke pasar global.

Menurut Eniya pada GHES 2025 ini juga akan diluncurkan pertama kali dokumen peta jalan hidrogen dan amonia nasional yang merupakan dokumen yang mencakup analisis produksi, pemanfaatan, atau demand dan bagaimana strategi implementasinya serta rencana aksi.

“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai upaya dekarbonisasi sistem energi nasional dan berkontribusi di global,” ungkap Eniya.

Lebih lanjut Dirjen EBTKE menjelaskan, GHES 2025 merupakan wadah kolaborasi global dimana kita dapat berinteraksi, sharing pengetahuan membangun kemitraan, *business matching* dan juga untuk mengembangkan inisiasi produksi dan pengembangan industri hidrogen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan capaian pengembangan hidrogen dengan terbangunnya *Hydrogen Refueling Station (HRS)* pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan.

“Kami dan Prof Eniya bekerja sudah tiga tahun akhirnya punya hydrogen *refueling station* di Senayan saat ini sudah berjalan,” jelas Darmawan.

Global Hydrogen Summit (GHES) 2025 berlangsung selama tiga hari, dari 15 April hingga 17 April 2025, dan diikuti oleh Kementerian ESDM, para pemangku kepentingan serta pelaku usaha, diantaranya PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PLN Energi Primer Indonesia, PT Generator Pasifik Indonesia, Transgasindo, Politeknik Negeri Bandung, Swagelok, dll. (RO)



KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI XII DPR RI

DI PLTU NPT UD PAITON, PROVINSI JAWA TIMUR

PAITON, 13 APRIL 2025

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memimpin rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di PLTU Paiton, Jawa Timur, Minggu (13/04/25)

Kementerian ESDM dan DPR Dorong Penerapan Teknologi Bersih di PLTU Paiton

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong seluruh pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk bersiap menghadapi tantangan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Salah satu hal yang didorong adalah penerapan teknologi bersih. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (13/4/2025).

"Dari KEN (Kebijakan Energi Nasional-red) dan RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional-red) yang sudah disusun dan diterbitkan, posisi PLTU Paiton saat ini sudah melakukan *study-study*, diantaranya dengan upaya biomass dengan tujuan akhir 10% bahkan paiton berkeinginan sampai 100%," ungkap Wanhar.

Dalam RUKN terdapat dua opsi penerapan teknologi energi bersih pada pembangkit berbasis batu bara.

"Bisa dengan *co-firing* biomassa 10% plus ditambah dengan penangkap karbon (CCS) atau bila mampu 100% yah 100%, bahkan di RUKN juga diberi kesempatan bisa diganti dengan *green amonia*," ungkapnya.

PLTU Paiton sendiri telah menerapkan teknologi *co-firing* biomassa sejak tahun

2020 dan berpartisipasi dalam perdagangan karbon, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap agenda transisi energi.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi pengelola PLTU Paiton yang telah mendukung transisi energi untuk pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE). Ia menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dilakukan karena PLTU Paiton merupakan contoh PLTU Batubara yang telah memenuhi kaidah lingkungan dimana dituntut untuk menurunkan emisinya, dengan menerapkan teknologi-teknologi baru.

"Kami mengapresiasi berbagai terobosan melalui berbagai inisiatif seperti *Green Hydrogren Plant* dan *co-firing biomassa* di PLTU Paiton," ungkapnya.

Menurut Sugeng, PLTU Paiton memiliki peranan penting bagi Indonesia semua dalam konteks energi, dimana terdapat 4,7 GW yang dihasilkan pembangkit ini.

"Artinya hampir 20% dan jika ditambah dengan PLTU Suralaya hampir 50% listrik di 2 titik ini, maka keseimbangan pasokan listrik khususnya di sistem Jamali, sehingga paiton memiliki posisi strategis," terangnya.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan mengungkapkan bahwa PLTU Paiton telah mendapatkan predikat PROPER Emas selama periode 2019–2023.

"Kami mengapresiasi capaian PLTU Paiton dan berharap terus melakukan perbaikan. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup ingin menjadi mitra pendukung, bukan penghambat, dalam menjadikan PLTU Paiton lebih baik lagi," katanya.

Seperti diketahui, PLN Nusantara Power (NP) merupakan salah satu pengembang Unit Pembangkitan Paiton. Saat ini PLN NP tengah mengembangkan lahan di sekitar PLTU menjadi kawasan industri biomassa, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Bahan biomassa yang digunakan beragam, mulai dari serbuk kayu (sawdust), limbah padi, *cocopeat*, limbah uang kertas (LURK), hingga sampah organik.

Melalui pendekatan ini, limbah yang sebelumnya tidak memiliki nilai dapat dimanfaatkan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara, sebagai langkah konkret menurunkan emisi karbon. (RA)

Posko Nasional RAFI Sektor ESDM Ditutup, Pasokan Listrik Dilaporkan Aman

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengapresiasi peran posko nasional sektor ESDM yang sangat strategis dalam memastikan kelancaran pasokan energi nasional, terutama dalam mendukung arus mudik dan balik lebaran yang melibatkan mobilitas jutaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dadan dalam Penutupan dan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1446 H di Jakarta, Jumat (11/04/25).

"Saya sangat bersyukur bahwa rangkaian kegiatan posko Ramadan dan Hari Raya Idulfitri tahun 2025 telah berhasil kita lalui dengan aman, lancar, dan terkendali. Posko Nasional Sektor ESDM ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat selama Hari Raya Idulfitri," ungkap Dadan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Sentot Harijady Brandjanto Tri Putro menyampaikan kondisi pasokan tenaga listrik selama periode RAFI 2025 dalam kondisi aman.

Menurut Sentot kondisi sistem ketenagalistrikan selama periode RAFI dalam kondisi aman dengan beban puncak (BP) tertinggi sebesar 44.639 MW dan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 56.119 MW sehingga mempunyai cadangan daya sebesar 11.480 MW atau 25,72%.

"Terpantau kondisi ketenagalistrikan pada periode RAFI tahun 2025, beban puncak meningkat sebesar 3,6% dan Daya Mampu Pasok meningkat sebesar 6,6% dibandingkan tahun 2024," tambah Sentot.

Untuk periode RAFI 2025 kali ini juga terpantau penggunaan mobil listrik roda 4 yang meningkat menjadi 19.852 unit. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang hanya 4.314 unit. Capaian ini diiringi dengan meningkatnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi sebesar 3.558 unit atau meningkat 274% dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 1.299 unit.

Pemantauan Posko Nasional Sektor ESDM telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 11 April 2025 bertempat di Gedung BPH Migas. Sepanjang momen Ramadan dan Idulfitri, Posko RAFI memantau ketersediaan pasokan energi termasuk sektor minyak dan gas bumi, hingga mengantisipasi kebencanaan di seluruh Indonesia. (JG)



Sekretaris Jenderal KESDM Dadan Kusdiana memimpin acara konferensi pers penutupan posko Nasional Sektor Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, Jakarta, Jumat (11/04/25)

Halal Bihalal Sektor ESDM, Menteri Bahlil Dorong Percepatan Perizinan

Setelah libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Halal Bihalal Sektor ESDM di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (09/04/2025).

Acara ini bertujuan menjalin silaturahmi dengan seluruh pegawai dan stakeholder di sektor ESDM. Saat menyampaikan sambutan pembuka acara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya percepatan perizinan demi mendorong efisiensi dan investasi di sektor energi.

“Tolong semua regulasi yang ‘berat’ segera diselesaikan karena kita butuh percepatan. Karena jika lambat, maka *stakeholder* sektor migas dan minerba juga melakukan proses yang tidak cepat, jadi kita harus responsif,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam Posko Nasional Sektor ESDM Periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa berkat kolaborasi yang telah terjalin, pemantauan yang dilakukan oleh sektor ESDM membuat masyarakat menjalankan ibadah selama Ramadhan dan Idulfitri dengan lancar.

“Terima kasih. Kita semua hadir di sini dalam rangka bersilaturahmi pasca Hari Raya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Hari Raya, Pertamina, PLN, kemudian beberapa stakeholder yang lain termasuk Kepala BNPB serta Badan Geologi Bandung, terima kasih sudah bekerja dengan bagus,” ujar Bahlil.

Dalam acara Halal Bihalal tersebut, Menteri Bahlil juga tak lupa mengajak seluruh pihak untuk saling memaafkan atas segala kekhilafan.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri mohon maaf lahir batin. Kita semua dalam suasana masih syawal, jadi kita sama-sama saling memaafkan,” tutup Bahlil.

Halalbihalal Keluarga Besar Sektor ESDM merupakan ajang silaturahmi yang rutin dilaksanakan setiap tahun setelah libur Idulfitri. Tema yang diangkat dalam acara ini adalah “Momentum Bulan Syawal Mencapai Kinerja Optimal”, yang diharapkan menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan komitmen seluruh insan ESDM dalam meningkatkan kinerja sektor energi kedepan. (U)



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1446 H Keluarga Besar Sektor KESDM, Jakarta, Rabu (09/04/25)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu memberi sambutan dalam acara Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1446 H Keluarga Besar Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (08/04/25)

Halal Bihalal, Momentum Penyemangat Peningkatan Kinerja

Mengawali hari pertama kerja usai libur Idulfitri, Keluarga Besar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Selasa (8/4/2025) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengingatkan seluruh pegawai agar momen Idul Fitri menjadi penyemangat dalam meningkatkan kualitas kerja.

Jisman menganalogikan kantor Ditjen Ketenagalistrikan sebagai ladang sawah bersama, sehingga semua pegawai mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaganya agar produksi sawah tersebut menghasilkan output yang terbaik. Ia mengingatkan bahwa setiap unit sama-sama memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Saya harap kita semua bekerja dengan baik dan saling mempercayai. Tidak ada saling mencurigai,” pesan Jisman.

Ia juga menekankan pentingnya tradisi silaturahmi dan saling memaafkan di Hari Raya Idulfitri. Tradisi ini mengingatkan bahwa manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Dengan saling memaafkan, hati akan menjadi lebih damai dan tenteram.

Idulfitri, menurutnya merupakan momen refleksi diri, ungkapan rasa syukur, kemenangan, dan kegembiraan setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Ibadah puasa tersebut disempurnakan dengan ibadah lainnya diantaranya berbagi dengan sesama.

“Momen Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H yang kita laksanakan hari ini menjadi media yang baik bagi kita semua untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama, terjalinnya persaudaraan yang lebih erat antara teman maupun rekan kerja,” ujarnya.

Menurutnya, Idulfitri adalah hari raya kesucian, di mana umat Muslim terlahir kembali dengan fitrah kemanusiannya yang suci, bersih dari dosa dan mendapat kekuatan serta semangat yang baru. Ia berharap agar terus melakukan amalan kebaikan dan perbaikan, bagi diri sendiri maupun sesama.

Selain memberikan arahan kepada pegawai, Jisman juga mengajak para pemangku kepentingan yang berkantor di Ditjen Ketenagalistrikan agar terus meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk mencapai target dari berbagai program yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, Jisman mengajak seluruh pegawai untuk berjabat tangan, saling memaafkan, dan memaknai Hari Raya Idulfitri dengan semangat kemenangan, kegembiraan, dan kesucian serta memanjatkan doa agar seluruh amalan ibadah pada bulan Ramadhan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Acara Halal Bihalal ini turut dihadiri oleh para pegawai Ditjen Gatrik serta perwakilan dari ASEAN Centre for Energy (ACE), Just Energy Transition Partnership (JETP), Enhancing Readiness For The Transition To Electric Vehicle In Indonesia (ENTREV), dan Pengurus Dharma Wanita UP Ditjen Ketenagalistrikan. (RO)





Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerja di Kantor PLN UP3B Maluku, Maluku, Sabtu (05/04/25)

Menteri ESDM Dorong PLN Bangun PLTP 40 MW di Maluku

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong PT PLN (Persero) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku. Kementerian ESDM dan PLN telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit geothermal tersebut dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN terbaru.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PLN Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) Maluku, Sabtu (5/4/2025).

Kunjungan ini sekaligus pengecekan kesiapan Satgas Hari Raya Idulfitri Kementerian ESDM untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan pasokan listrik selama masa arus mudik dan arus balik di Ambon, Maluku.

“Saya ingin sampaikan bahwa di Maluku Tengah terdapat potensi panas bumi sebesar 40 MW. Ini sudah kami masukkan dalam RUPTL. Supaya apa, supaya tidak lagi tergantung pada solar, tidak lagi tergantung pada batubara,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut ia menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melakukan peremajaan terhadap pembangkit-pembangkit diesel tua yang sudah memasuki masa prioritas. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan energi bersih dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

“Begitu ada mesin-mesin yang sudah tua, diesel, langsung masuk kepada energi baru-terbarukan. Ini bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan energi terbarukan,” tegasnya.



Dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri, kondisi kelistrikan nasional secara umum dilaporkan berjalan dengan baik dan lancar. Tidak terdapat gangguan atau pemadaman listrik yang berarti, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Pemanfaatan mobil listrik pun berjalan optimal, dengan ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memadai. Berdasarkan pemaparan dari pihak PLN, seluruh sistem kelistrikan selama momentum Idul Fitri tetap stabil dan andal.

“Overall secara nasional dalam persiapan Hari Raya Idulfitri alhamdulillah bagus, listrik juga demikian tidak ada masalah tidak ada yang padam-padam,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bahlil juga mencatat bahwa sebanyak 30 desa yang sebelumnya belum terlistriki kini sudah mulai mendapat akses listrik. Langkah ini akan terus didorong ke desa-desa lainnya, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Maluku, Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan, Sumatera, serta Sulawesi.

“Nah ini salah satu program dari pemerintahan Pak Prabowo, kebetulan kami diperintahkan untuk turun ke lapangan dalam memastikan desa-desa mana saja yang akan kita dorong penetrasi programnya” pungkasnya.(AT)

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari membuka acara *Sharing Session Pengendalian Gratifikasi* secara online, Jakarta, Kamis (25/03/25)

Jelang Hari Raya Idulfitri, Ditjen Gatrik Gelar *Sharing Session* Pengendalian Gratifikasi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar *Sharing Session* Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan yang diselenggarakan secara online ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengendalian gratifikasi, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

"Upaya pemberantasan korupsi dapat dimulai dengan pengendalian gratifikasi, karena gratifikasi merupakan akar dari korupsi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, dalam *Sharing Session* bertajuk "Belajar Pengendalian Gratifikasi Bersama UPG Kementerian Pekerjaan Umum" yang diselenggarakan pada Kamis (25/03/2025).

Ida menambahkan bahwa pelaksanaan *Sharing Session* menjelang Hari Raya Idulfitri sangat tepat mengingat hari-hari besar keagamaan berpotensi menjadi momen rawan pemberian dan penerimaan gratifikasi yang dilarang oleh peraturan.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan dan membangun Zona Integritas, pimpinan serta seluruh pegawai Ditjen Ketenagalistrikan harus memegang empat prinsip utama, yaitu *No Bribery* (tidak boleh ada suap-menyuap), *No Kickback* (tidak boleh ada uang komisi), *No Gift* (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar), dan *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada jamuan mewah atau berlebihan).

Lebih lanjut Ida menerangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Untuk itu acara ini diharapkan sejalan dengan visi Presiden dalam mendorong kepatuhan pelaporan gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Mata rantai gratifikasi harus kita putus supaya tidak berlanjut ke generasi penerus kita," tegas Ida.

Narasumber *Sharing Session*, Inspektur VI Kementerian Pekerjaan Umum, Moch. Yusuf Hariagung selaku Ketua UPG Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi umumnya tidak dilakukan oleh individu saja, melainkan melibatkan kelompok atau pihak lain yang turut serta dalam kegiatan tersebut.

"Dari setiap kali kasus-kasus korupsi selalu yang terlibat lebih dari satu (orang –red)", jelas Yusuf.

Ia juga menjelaskan bentuk-bentuk korupsi sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya menyebabkan kerugian keuangan negara, suap menyuap secara transaksional, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan/pungli, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

Yusuf memaparkan bahwa pihaknya telah mengantisipasi tindak pidana korupsi dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia lebih dini, dimulai dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menetapkan kriteria kelulusan dari indikator integritas yang bernilai 4 dari skala 5, sehingga jika nilai CPNS di bawah 4, dinyatakan tidak lulus.

"Kementerian PU sudah berbenah diri untuk

menyiapkan CPNS-CPNS muda untuk bisa mempunyai integritas yang lebih baik," papar Yusuf.

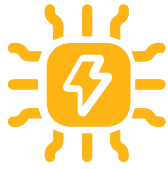
Lebih lanjut Yusuf juga memaparkan komitmen Pimpinan dalam pengendalian gratifikasi dengan menerbitkan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum terkait Pengendalian Gratifikasi pada Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya di Kementerian Pekerjaan Umum, yang diikuti dengan terbitnya surat edaran Inspektur Jenderal untuk mencegah terjadinya gratifikasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia juga memaparkan pihaknya berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian kegiatan Internalisasi Anti Gratifikasi, diantaranya Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI), Internalisasi Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Budaya Integritas, E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI), E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi, dan Workshop Pengendalian Gratifikasi.

Sharing Session ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan ini rutin diselenggarakan sebelum hari raya keagamaan. (RO)

Ketahanan Energi Nasional: Menyusun Ulang Strategi di Tengah Ketidakpastian Global

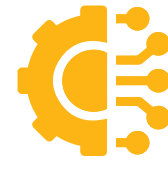
Ketahanan energi telah menjadi salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional di era modern. Di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi, dan krisis iklim, ketahanan energi tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai bagian integral dari stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kedaulatan negara.



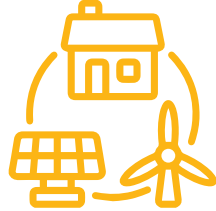
Diversifikasi Sumber Energi



Efisiensi Energi di Semua Sektor



Digitalisasi & Teknologi Cerdas Sistem Energi



Infrastruktur Energi Terintegrasi



Reformasi Kebijakan Energi

Gambar 2. Lima Strategi Ketahanan Energi Nasional Indonesia: Diversifikasi energi, efisiensi energi, digitalisasi sistem energi, pembangunan infrastruktur terintegrasi, dan reformasi kebijakan energi nasional.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan populasi besar dan kebutuhan energi yang terus meningkat, ketahanan energi menjadi kunci bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Berbicara mengenai ketahanan energi, selalu dihubungkan dengan pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya. Lebih detailnya, ketahanan energi didefinisikan sebagai keahlian atau kemampuan suatu bangsa untuk menjamin pasokan energi yang dibutuhkan dalam waktu yang panjang dan berkelanjutan. Menyangkut aspek ini, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan yaitu, penyediaan energi primer dari bahan baku batu bara, minyak, gas atau sumber energi lainnya dan selanjutnya beralih kepada pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur yang kuat serta sistem regulasi.

Tantangan dalam Ketahanan Energi Nasional

Salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan energi Indonesia adalah masih tingginya penggunaan energi fosil, terutama batu bara dan minyak. Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia, namun kecenderungan konsumsi dalam negeri dan volatilitas harga di pasar internasional menjadi risiko yang cukup strategis. Di sisi lain, ketergantungan pada BBM impor juga turut memberikan dampak

negatif pada neraca perdagangan maupun stabilitas fiskal negara. Krisis peperangan seperti konflik Rusia dan Ukraina mengungkapkan betapa rentannya sistem energi dunia dan Indonesia sendiri ketika disrupsi pada ekonomi geopolitik. Pembatasan pemakaian bahan bakar minyak dan gas berserta kenaikan harganya berakibat domino bagi negara berkembang seperti Indonesia. Melihat hal ini, pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk membangun strategi ketahanan energi yang bersifat adaptif serta mengintegrasikan resilien ke sistem ketahanan energi.

Diversifikasi Sumber Energi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendiversifikasi sumber energi. Tentu saja, seluruh porsi pemanfaatan energi terbarukan perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap fosil. Dengan itu, sudah seharusnya Indonesia berusaha meraih dan mengembangkan potensi sumber daya energi terbarukan seperti angin, surya, air, dan bioenergi. Sayangnya hal ini sulit untuk direalisasikan di negara kita karena masih banyak kendala seperti minimnya infrastruktur, peraturan regulasi yang belum sinkron, serta rendahnya intensif investasi. Pengurangan emisi gas rumah kaca adalah hal yang bisa dicapai apabila kita memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal untuk energi

terbarukan, hal ini juga berpengaruh ke perekonomian negara. Contohnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat menerangi serta memajukan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Selain itu penghidupan lapangan kerja yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat lokal dan memperkenalkan ketahanan energi di negeri kita.

Efisiensi Energi di Semua Sektor

Kedua, setiap sektor baik industri, transportasi, maupun rumah tangga perlu memperlakukan efisiensi energi sebagai agenda utama. Produk dan Daya Energi dapat ditekan melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta melalui teknologi hemat energi tanpa mengorbankan produktivitas. Mendorong efisiensi ini bisa dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif bagi penerapan manajemen energi pada industri, membangun sistem audit energi nasional, dan meningkatkan literasi energi pada masyarakat.

Digitalisasi & Teknologi Cerdas Sistem Energi

Ketiga, strategi baru pada ketahanan energi akan memperhatikan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi cerdas pada sistem energi. Monitoring, pengelolaan dan optimasi, serta distribusi energi secara real-time, bisa dibantu dengan teknologi smart grid, sistem

manajemen energi berbasis IoT, dan *big data analytics*. Indonesia bisa mengurangi *losses* serta meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan dengan meningkatkan efisiensi distribusi energi menggunakan sistem cerdas.

Infrastruktur Energi Terintegrasi

Keempat, pembangunan infrastruktur energi terintegrasi dan berkelanjutan juga harus dipercepat. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, terminal LNG, kilang minyak, dan penyimpanan energi maupun proyek lainnya yang strategis perlu perencanaan jangka panjang yang matang. Dalam hal ini, pembangunan perlu lebih banyak ditangani oleh pihak swasta dan kemitraan publik-swasta untuk memperlebar dukungan dan sumber pendanaan.

Reformasi Kebijakan Energi

Kelima, kebijakan energi nasional perlu diperbarui dengan pendekatan jangka panjang, multisektor, dan berbasis bukti. Ada banyak hal yang perlu difokuskan oleh pemerintah, seperti merumuskan kebijakan yang konsisten, memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang jelas, membuka partisipasi publik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Pemerintah juga perlu tetap fokus pada kenyataan bahwa selama fase transisi energi, selalu perlu untuk menyeimbangkan permintaan akan energi yang terjangkau, dan kebutuhan akan transisi energi bersih.

Diskusi dan Rekomendasi

Dengan energi bersih, tantangan bagi pemerintah adalah menemukan keseimbangan yang tepat dengan kebutuhan energi yang terjangkau. Namun, dalam upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dengan tuntutan lainnya, pemerintah

tetap memegang kendali penuh atas manajemen energi, tetapi dari perspektif yang lebih luas. Kolaborasi multi-pemangku kepentingan menjadi landasan untuk memikirkan kembali strategi energi secara menyeluruh. Sehingga demikian, akademisi dan lembaga penelitian memegang peranan penting karena mereka memberikan analisis yang diperlukan dan inovasi teknologi, dunia bisnis memberikan dorongan untuk implementasi, dan masyarakat umum perlu terlibat secara aktif sebagai pengguna akhir dalam mengubah perilaku terhadap konsumsi energi. Selain itu, penggunaan pendekatan pentahelix, yang mencakup pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan warga negara, memungkinkan penciptaan model energi ideal yang terjangkau bagi ekonomi namun perlu dipertahankan untuk kemajuan lebih lanjut.

Dalam dunia di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat, seiring dengan peningkatan ketidakpastian geopolitik, kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, strategi ketahanan energi memerlukan perubahan yang fleksibel dan dinamis. Salah satu pendekatan yang mungkin berguna adalah perencanaan skenario, yang berarti mengembangkan kebijakan berdasarkan kemungkinan masa depan yang beragam. Dengan cara ini, Indonesia akan lebih siap untuk mengatasi ekonomi yang lemah, permintaan yang fluktuatif, dan faktor eksternal yang dapat mengganggu pasar energi.

Lebih jauh lagi, ketahanan energi nasional tidak dapat dipisahkan dari agenda keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Transisi energi yang tidak mempertimbangkan lingkungan dapat menimbulkan paradoks baru

dalam pembangunan. Oleh karena itu, keberlanjutan harus muncul sebagai landasan dari setiap keputusan yang berkaitan dengan energi. Ini mencakup perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan teknologi emisi rendah.

Terakhir, membangun ketahanan energi berdasarkan wilayah juga sama pentingnya. Indonesia secara keseluruhan sangat beragam secara sosial dan geografis, yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan ciri-ciri lokal. Otoritas lokal perlu diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan dan pengelolaan energi, termasuk pengembangan sumber daya energi lokal, membangun kapasitas teknis, dan mengintegrasikan masyarakat. Desentralisasi energi ini meningkatkan tidak hanya efisiensi tata kelola energi tetapi juga rasa kepemilikan publik terhadap agenda ketahanan energi nasional.

Ketahanan energi nasional adalah satu-satunya landasan dasar untuk memastikan kemandirian dan kemajuan bangsa. Merevisi rencana tindakan di tengah ketidakpastian global bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan. Dengan diversifikasi energi, efisiensi, digitalisasi, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, Indonesia dapat membangun sistem energi yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Masa depan energi Indonesia perlu direncanakan dengan mempertimbangkan realitas saat ini, tetapi dengan perspektif visi jauh ke depan demi kemaslahatan generasi mendatang.



Penulis :

Rahadian Nopriantoko

Dosen PEP Bandung – KESDM RI

0813 12000 913

Rahadian.Nopriantoko@esdm.go.id

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari memberikan sambutan dalam membuka acara Liga Futsal Gatrik, Jakarta, Jumat (02/05/25)

Sponsored By:



Liga Futsal Gatrik : Tingkatkan Produktifitas melalui olah raga



Liga Futsal ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antar unit sehingga dapat mengakselerasi produktifitas bagi seluruh pegawai, Hal ini disampaikan dalam sambutan Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan saat membuka Liga Futsal Gatrik yang diikuti seluruh unit di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan di Jakarta (02/05/25).



Ngobrolin Dunia ASN Bareng Ahli SDM Gatrik

“Selaku pengelola SDM (Sumber Daya Manusia –red), awalnya kita itu menetapkan kebutuhan ASN, setelah kebutuhan itu terpetakan, kita lanjut dengan pengadaannya, setelah mereka masuk kita mulai *maintenance* bagaimana jenjang karirnya, pengembangan kompetensinya, pangkat jabatannya dan juga penilaian kinerjanya, tentu ada disiplin yang harus kita kawal.”

Mengemban tugas sebagai Pranata Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Madya dan Subkoordinator Sumber Daya Manusia membuat Rahayu Kurniasari yang sering disapa Ibu Nia akrab dengan seluruh pegawai. Hari-harinya disibukkan dengan menata dan membina para pegawai agar mereka mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif dan efisien dan terus meningkatkan kualitas dan kinerja mereka.

Bentuk pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Nia dapat dilakukan melalui pendidikan dan

pelatihan. Pendidikan melalui tugas belajar dengan

melanjutkan *study* di dalam negeri, luar negeri, dan tugas belajar mandiri. Sedangkan untuk pelatihan, Nia menjabarkan dapat dilaksanakan dengan pelatihan metode klasikal yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, non klasikal dengan pembelajaran mandiri atau pembelajaran jarak jauh serta magang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi terkait.

Berikut cuplikan Infogatrik saat melakukan wawancara dalam Podcast “Kepoin - Kenalin Program Infogatrik” episode Ngobrolin Dunia ASN Bareng Ahli SDM Gatrik, Rahayu Kurniasari yang kita angkat sebagai Profil Pegawai Buletin Ketenagalistrikan edisi kali ini:

Infogatrik: Halo Bu Nia apa kabar, lagi sibuk apa akhir-akhir ini?

Nia: Sekarang saya lagi sibuk persiapan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil –red) yang mau masuk ke Ditjen Ketenagalistrikan, dan kegiatan rutin lainnya terkait pengelolaan SDM.

Infogatrik: Nah Ibu kan sekarang menjabat sebagai Subkoordinator SDM di Ditjen Gatrik, bisa diceritakan Bu Ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab Ibu Nia apa saja?

Nia: Selaku pengelola SDM, awalnya kita itu menetapkan kebutuhan ASN, setelah kebutuhan itu terpetakan, kita lanjut dengan pengadaannya, setelah mereka masuk kita mulai *maintenance* bagaimana jenjang karirnya, pengembangan kompetensinya,

pangkat jabatannya dan juga penilaian kinerjanya, tentu ada disiplin yang harus kita kawal, pegawai harus tetap disiplin sampai nanti pegawai ada penghargaan dan juga pensiun.

Infogatrik: Bentuk pengembangannya (karir –red) seperti apa sih Bu?

Nia: jadi pengembangan karir sendiri itu bisa melalui pendidikan, bisa melalui penelitian, pendidikan itu bisa dari tugas belajar (TB) dalam negeri, tugas belajar luar negeri, maupun tugas belajar mandiri, sementara yang pelatihan itu bisa sifatnya klasikal, maupun non klasikal, pelatihan klasikal itu bisa tatap muka di kelas, ataupun zoom ya, dari zaman covid kita kan sering melakukan pelatihan yang zoom, itu namanya klasikal juga walaupun jarak jauh, nah kalau non klasikal bisa bentuknya seperti OSL (*One Stop Learning* –red) ya, mengikuti SMILE di Ngantor (aplikasi e-learning SMILE untuk seluruh PNS Kementerian ESDM –red), dan juga ada magang, magang antara eselon satu dan magang industri.

Infogatrik: Ibu tadi nyebutin juga tentang bagaimana kita mengikuti pelatihan bisa di luar negeri, bagaimana mekanisme seorang ASN bisa ikut tugas belajar di luar Negeri?

Nia: Nah di tugas belajar itu harus sesuai dengan rencana pengembangan karir di instansi, kalau teman-teman yang sudah bekerja baru bergabung itu harus minimal satu tahun bekerja dulu, terus SKP-nya baik, lalu tidak pernah hukuman disiplin, juga harus lolos seleksi, lolos seleksinya itu di Kementerian ESDM, dan juga lolos seleksi

Rahayu Kurniasari

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia

Pranata Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Madya

di *Letter of Acceptance* (LoA) dari kampus. Kalau semuanya sudah terpenuhi nanti akan menandatangani perjanjian tugas belajar, di situ ada klausul, ada ikatan dinas, ada apa saja yang didapatkan, apa saja nanti yang menjadi kewajibannya, misalnya gagal tugas belajar harus mengembalikan dan sebagainya, jadi semua pegawai berkesempatan untuk mengikuti pendidikan itu.

Infogatrik: Jadi semua punya kesempatan ya Bu, selain tugas belajar juga ada pelatihan jangka pendek, itu gimana Bu bedanya?

Nia: Pelatihan jangka pendek yang di luar negeri maksudnya? Jadi gini, kita sudah dari tahun ke tahun mendapatkan penawaran *short course* dari luar negeri, ada dari Jepang, dari Tiongkok, dari Selandia Baru, Denmark gitu ya, dan banyak negara lainnya. Jadi skemanya itu dari mereka yang sudah bekerja sama setiap tahun memberikan penawaran ke kita, untuk *short course* tersebut. Nanti Pimpinan mendisposisi sesuai dengan tusi saat ini dan yang akan datang, jika memenuhi syarat pegawai tersebut akan dikirimkan untuk mengikuti *short course* tersebut dan tentunya nanti sekembalinya dari penugasan akan sharing ke pegawai yang ada di Ditjen Ketenagalistrikan, jadi ilmunya itu dibawa ke sini dan diaplikasikan

Infogatrik: Sampai saat ini sudah berapa jumlah pegawai Ditjen Gatrik yang udah ikut pelatihan atau beasiswa di luar negeri Bu?

Nia: kalau untuk tugas belajarnya yang sudah lulus nih alumni ada 15 orang, proses pencantuman gelar ada 1 orang, semetara yang lagi running menjalani tugas belajar ada 5 orang, yang alumni ada dari UK (United Kingdom –red), ada dari Belanda, Selandia Baru, Jepang, Korea, Tiongkok, Australia. Tentunya ini penawaran menarik ya bagi teman-teman yang mau bergabung dengan Ditjen Ketenagalistrikan kesempatan itu terbuka luas.

Infogatrik: Wah, saya juga pengen kan bu, tadi Ibu sebutin negara-negaranya banyak, kita juga jadi pengen semua nih Bu. Terus katanya kalau misalnya sudah pulang Bu, itu ikut ya Bu program yang berbagi tadi di Alumni *Talk*, itu juga udah banyak ya Bu yang ikut?

Nia: Betul, nah itu salah satu sarana kita

untuk memberikan kesempatan bagi pegawai yang selesai tugas belajar maupun *short course* untuk membagi ilmunya ya. Terima kasih nih kepada teman-teman Humas yang telah memfasilitasi. Kemarin ada Mbak Cinta yang sudah *sharing*, ada Mas Bintang dan juga teman-teman yang lain, sangat menarik ya terutama tentang *sharing* hidup di luar negeri.

Infogatrik: Sekarang kita balik lagi Bu ke peran ASN, sekarang katanya ada Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan juga Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), itu perbedaannya apa sih Bu?

Nia: Perbedaannya, kalau JFU itu mempunyai tanggung jawab yang lebih sederhana, dalam memberikan pelayanan, nah kalau yang JFT itu agak sedikit lebih kompleks karena terkait dengan keahliannya. JFT sendiri di kita sendiri ada 19 jenis, yang diampu oleh 215 pegawai. Di kita paling banyak itu Analisis Kebijakan ada 96 orang, lalu disusul Inspektur Ketenagalistrikan ada 90 orang, lalu yang ke-3 Perencana ada 24 orang, selebihnya menyebar.

Infogatrik: Sekarang apa sih Bu tantangannya dari pengembangan SDM itu terutama dengan tadi JFU-JFT?

Nia: Nah ini yang menjadi isu krusial sekarang, semua unit mengalami jadi teman-teman itu terbatas dengan adanya peta jabatan. Kemarin ada beberapa pegawai yang sudah mengikuti uji kompetensi, namun tidak bisa dilantik karena terbatas peta jabatan di unit tersebut. Sesuai dengan peraturan BKN bagi pegawai yang sudah lulus uji kompetensi dan tidak ada peta jabatannya itu diperkenankan untuk dinaikkan pangkatnya satu kali.

Infogatrik: Selain pengembangan, Ibu Nia juga di pembinaan ya Bu, penegakan aturan, ada nggak sih Bu mekanisme pemberian *reward and punishment* kepada ASN ini Bu?

Nia: Tentunya ada, kita ngomong *reward* dulu biar senang ya. Jadi teman-teman kita ada namanya Satya Lencana Karya Satya, ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu bagi pegawai yang melakukan pengabdian setia kepada negara secara terus menerus, jadi bagi pegawai yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin baik sedang

maupun berat dan juga tidak sedang cuti di luar tanggungan negara itu berhak kita usulkan Satya Lencana Karya Satya, itu dari Presiden Iho yang tanda tangan, dan juga di Ditjen Ketenagalistrikan ada namanya Gatrik Award, nah itu sudah sekitar 5 tahun ini kita laksanakan dan itu di forum yang besar, dihadiri mulai dari pimpinan sampai staf kita berikan award, itu menjadi motivasi tersendiri bagi pegawai. Kalau ngomongin *punishment* sedih ya, jadi kita harus menegakkan disiplin karena Pegawai Negeri Sipil itu harus melaksanakan kewajiban disamping haknya, kalau hak-hak sudah kita penuhi tentunya. Kalau kewajiban ya antara lain harus tertib untuk datang ke kantor, tidak melanggar ketentuan jam kerja, itu yang paling banyak dilanggar oleh teman-teman, tiga hari alpha itu udah mendapatkan teguran, kalau misalnya sampai hukuman disiplinnya itu sedang atau berat, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan karir itu terhambat, jadi menjadi catatan tersendiri untuk hukuman disiplin.

Infogatrik: Buat Ibu Nia sendiri, ada nggak suka duka dari pribadi Ibu dalam menajalankan tugas ini Bu?

Nia: Sukanya itu kalau ada pegawai yang dilantik, naik jenjang, naik pangkat mendapatkan award gitu nah kita senang, juga berhasil untuk studi keluar negeri, mendapatkan *short course* ke luar negeri, kalau pegawai bahagia kita bahagia dan men-support penuh. Kalau sedihnya, kalau pegawai tidak disiplin, tidak berkinerja, pegawai tidak serius dalam bekerja padahal kantor meberikan hak-haknya, itu yang kita sedih karena di luaran sana banyak orang yang berkompetisi untuk menjadi PNS. Seharusnya menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang sudah duduk di Ditjen Ketenagalistrikan ini, seperti yang kita janjikan, kita akan berkinerja memberikan yang terbaik untuk Negara dan Bangsa.

Nah sobat Gatrik begitu lah ngobrol singkat dengan Ibu Nia, di Rubik Profil Pegawai. Nantikan profil pegawai Infogatrik berikutnya yah, tentunya dengan banyak cerita dan inspirasi seru lainnya.

Mengendalikan Diri Dari Depresi



Pengarang : M. Heri Susilo
 ISBN : 9786231649294
 Penerbit : Anah Hebat Indonesia
 Tempat Terbit : Yogyakarta
 Tahun terbit : 2024
 336 pages.; 18 cm

Abstrak

Buku ini menceritakan bagaimana cara mengendalikan diri dari depresi serta mengendalikan diri dari emosi dan masalah betubi-tubi. Siapa saja yang dapat terkena depresi? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari depresi? Bagaimana cara mengendalikan pikiran di saat kita tidak bisa mengendalikan keadaan? Apa itu teknik *Tapping Depression*? Melalui teknik-teknik sederhana dari metode *Emotional Freedom Techniques* (EFT), pembaca akan diajak untuk mengatasi berbagai masalah dengan lebih mudah. Metode ini memungkinkan pembaca untuk melepaskan beban emosional, mengatasi berbagai tantangan, dan menghadapi kenyataan dengan lebih terbuka.

Operasi Sistem Tenaga Listrik



Pengarang : Djiteng Marsudi
 ISBN : 9789797561192
 Penerbit : Graha Ilmu
 Tempat Terbit : Yogyakarta
 Tahun terbit : 2006
 Xii+576 pages.; 26 cm

Abstrak

Tenaga Listrik merupakan komoditi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, oleh karenanya penyediaannya bagi masyarakat haruslah seekonomis mungkin dengan memperhatikan mutu dan keandalan. Untuk mencapai hal ini sistem tenaga listrik yang menghasilkan tenaga listrik, haruslah dioperasikan dengan profesionalisme yang tinggi agar tercapai kondisi operasi yang optimum.

Melihat masa depan penyediaan tenaga listrik di Indonesia, interkoneksi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bukanlah impian belaka, tetapi mungkin dapat menjadi kenyataan. Jika hal ini terjadi maka ekspor-impor tenaga listrik dengan negara tetangga akan merukan bisnis tenaga listrik yang harus ditangani secara profesional. Buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pikiran bagi mahasiswa dan bagi para profesional yang berkecimpung dalam pengelolaan penyediaan tenaga listrik.



Halo Sobat Gatrik, ini adalah rubrik Tanya Jawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di subsektor ketenagalistrikan. Untuk edisi bulan ini Infogatrik telah mengumpulkan beberapa pertanyaan terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagai berikut:



Apa saja pokok-pokok dalam RUPTL 2025-2034?

Dokumen RUPTL PLN 2025-2034 merupakan komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76 persen kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Untuk mendukung distribusi dan keandalan sistem, pembangunan infrastruktur kelistrikan juga diperkuat. Pemerintah menargetkan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA, yang akan tersebar di seluruh Indonesia--dari Sumatera hingga Papua.



Bagaimana peluang investasi dalam RUPTL?

Dari sisi investasi, RUPTL PLN ini membuka peluang senilai Rp2.967,4 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Sekitar 73 persen dari total kapasitas pembangkit direncanakan berasal dari skema kemitraan dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya akan dikelola oleh Grup PT PLN.



Apa dampak RUPTL dalam menciptakan lapangan kerja?

RUPTL diproyeksikan dapat menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Peluang ini tersebar di berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk sektor manufaktur pendukung. EBT menjadi kontributor utama serapan tenaga kerja, sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Dari total 836.696 tenaga kerja di segmen pembangkitan, lebih dari 760 ribu atau 91% merupakan green jobs.



Bagaimana rencana pembangunan PLTN sesuai RUPTL?

Indonesia telah sejak lama menunjukkan kesiapan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). PLTN secara resmi sudah masuk ke dalam RUPTL PLN 2025-2034 sebagai salah satu agenda pembangunan.

Dalam RUPTL, pemerintah menargetkan PLTN bisa berkontribusi 500 megawatt (MW) (250 MW di Sumatera dan 250 MW di Kalimantan) dalam 10 tahun ke depan dari porsi keseluruhan energi baru terbarukan yang mencapai 42,6 gigawatt (GW).



Bagaimana perencanaan listrik perdesaan?

Saat ini terdapat 5.758 desa (6,87% dari total desa di Indonesia) yang masih belum mendapatkan layanan listrik. Dalam draft RUPTL PLN 2025 - 2034, terdapat program listrik desa (LISDES) selama lima tahun (2025-2029) untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik.

Program LISDES bertujuan menyediakan sambungan listrik bagi 780 ribu rumah tangga dengan penambahan kapasitas pembangkit hingga 394 MW. Total kebutuhan investasi listrik desa 5 tahun ke depan mencapai Rp 50,01 triliun.



Bagaimana cara mendapatkan dokumen resmi RUPTL?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merilis atau mengunggah dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034. Bagi publik yang ingin mengakses dokumen ini secara utuh dapat mengakses melalui laman resmi Kementerian ESDM (esdm.go.id), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (gatrik.esdm.go.id), dan PLN (pln.co.id). Dokumen ini juga tersedia pada laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kementerian ESDM melalui tautan jdih.esdm.go.id.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen tersebut dapat menyampaikannya melalui kanal informasi Kementerian ESDM di Contact Center 136 atau melalui email Ditjen Ketenagalistrikan di infogatrik@esdm.go.id

Yuk Kita Kenalan dengan PLTP Ijen di Jawa Timur



Pembangkit Panas Bumi Pertama di Jawa Timur!

PLTP Blawan Ijen adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Jawa Timur, dengan kapasitas 35 MW, cukup untuk mengaliri listrik ke sekitar 85.000 rumah tangga. Proyek yang dikembangkan oleh PT Medco Cahaya Geothermal ini mulai beroperasi pada 9 Februari 2025.



Teknologi Binary 2-Fasa yang Ramah Lingkungan

PLTP Blawan Ijen menggunakan teknologi Binary 2-Fasa dengan sistem 100% reinjeksi, artinya seluruh cairan panas bumi dikembalikan ke dalam bumi hampir tanpa emisi dan menjaga keseimbangan alam.



Proyek Raksasa, Serapan Tenaga Lokal Tinggi!

Pembangunan dan operasional PLTP Blawan Ijen melibatkan ribuan orang, termasuk lebih dari 360 warga lokal yang diberdayakan secara langsung!



PLTP Blawan Ijen, Si Raja Penghargaan!

PLTP Blawan Ijen menyabet berbagai penghargaan bergengsi, antara lain:

- Subroto Award (2023 & 2024)
- Zero Accident Award (2024)
- ESG Award PT SMI (2024)
- dan K3LL Award Gubernur Jatim (2025)



CARILAH... 5 PERBEDAAN DARI GAMBAR DIBAWAH INI YAA

Hallo sobat gatrik...dari gambar dibawah ini sobat coba cari 5 (lima) perbedaan yaaa.....selamat mencoba ya sobat....!!

1



2



Sobat gatrik bisa foto atau screen shot halaman kuis ini dan tandai jawaban perbedaan dari kedua gambar tersebut yaa sobat.....

Ketentuan :

1. Jawaban beserta biodata diri (nama dan email/nomor HP) agar dikirimkan melalui email ke infogatrik@esdm.go.id dengan subyek : **Kuis Cari Perbedaan Buletin Juni 2025**
2. Batas akhir pengumpulan jawaban andalah 1 Agustus 2025
3. Dua pemenang akan mendapatkan e-money masing-masing senilai Rp.100.000,-
4. Redaksi Infogatrik akan memilih **2 pemenang teratas** yang akan mendapatkan hadiah
5. Pengumuman pemenang ada pada **Buletin edisi September 2025** yang terbit pada awal Oktober 2025

JAWABAN QUIZ EDISI LALU

GAMES : BENAR ATAU SALAH

SALAH



BENAR



SPKLU merupakan kepanjangan dari Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum.



Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.



PLTS adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya, yaitu sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik.



Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia adalah PLTB Tolo Jeneponto, yang terletak di Desa Karumpang Loe, Kecamatan Arungkeke, Jeneponto, Sulawesi Selatan.



PLTB merupakan salah satu pembangkit listrik energi bersih yang menggunakan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan.



PEMENANG QUIZ

BULETIN EDISI I MARET 2025 VOL. XXI

1. Rai Pramesti Suteja
2. Mustain

*Panita akan menghubungi pemenang untuk mendapatkan e-voucher masing-masing senilai Rp. 100.000



KANAL-KANAL PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN



Layanan tatap muka
di ruang pelayanan publik
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
sesuai jam kerja instansi



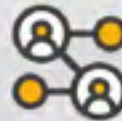
Contact Center
Kementerian ESDM di **136**;



Email resmi di
infogatrik@esdm.go.id;



Pengaduan melalui
Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
LAPOR;



Media sosial Facebook,
Instagram, maupun X
@infogatrik





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav 7-8, Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, email : infogatrik@esdm.go.id
gatrik.esdm.go.id



gatrik.esdm.go.id



@infogatrik



Info Gatrik

